

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan ridhaNya, Pemerintah Aceh telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011, sebagai bentuk komitmen nyata Pemerintah Aceh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan yang menyajikan informasi tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA).

Secara substantif LAKIP merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja guna mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan daerah serta strategi dalam pencapaian kinerja melalui pengukuran dan analisis terhadap Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis.

Penyusunan LAKIP tahun 2011 menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas yang secara normatif telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun disadari belum seluruh materi yang disajikan dalam laporan ini telah mencapai kesempurnaan, oleh karena itu sangat diharapkan adanya masukan

dan saran perbaikan terutama berkenaan dengan data-data yang mendukung penyempurnaan laporan ini.

Akhirnya penuh harapan LAKIP ini dapat bermanfaat sebagai informasi, referensi dan bahan evaluasi kinerja Pemerintah Aceh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Terima kasih.

Banda Aceh, Maret 2012

PENJABAT GUBERNUR ACEH

Ir. TARMIZI A. KARIM, M.Sc

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Aceh Tahun 2011 merupakan dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan, pengelolaan sumber daya dan sumber dana melalui program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyusunan LAKIP dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Aceh Tahun 2011 merupakan hasil pencapaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Aceh tahun 2011 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2007-2012.

Berdasarkan RPJMA 2007-2012 untuk mewujudkan sasaran pembangunan, Pemerintah Aceh masih menitikberatkan pada 7 (tujuh) prioritas pembangunan yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sumber daya energi

pendukung investasi. Peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar. Peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan. Pembangunan syariat Islam, sosial dan budaya. Penciptaan pemerintah yang baik, bersih, dan penyehatan birokrasi pemerintahan, serta Penanganan dan pengurangan risiko bencana.

Untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Aceh, telah ditetapkan 26 Indikator Kinerja Utama, 14 Sasaran Strategis dan 58 Indikator Kinerja Sasaran, guna mengukur tingkat pencapaian target sasaran strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 26 indikator kinerja utama diperoleh tingkat capaian rata-rata 85,96%. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Aceh dapat dikategorikan baik dalam mewujudkan pencapaian sasaran, program dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil pengukuran sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan menurunnya angka kemiskinan yang dilakukan melalui 8 (delapan) indikator kinerja yang ditetapkan, diperoleh tingkat capaian rata-rata sebesar 55,37%, atau dengan kategori cukup. Tingkat pencapaian sasaran strategis ini masih dikategorikan dengan nilai cukup, karena hasil realisasi beberapa indikator kinerja diperoleh berdasarkan keadaan pada triwulan I Tahun 2011.

Terhadap sasaran strategis meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan sarana/prasarana permukiman yang diukur dari 6 (enam) indikator kinerja, diperoleh tingkat capaian rata-rata sebesar 98,79% atau dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah Aceh dalam melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta sumber daya energi pendukung investasi yang merupakan salah

satu prioritas pembangunan Aceh dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.

Selanjutnya, tingkat capaian rata-rata sasaran strategis meningkatnya ketepatan bangunan irigasi, pengaman pantai dan normalisasi sungai yang diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja, diperoleh tingkat capaian rata-rata sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis ini sangat positif, karena dengan meningkatnya luas cakupan irigasi memberi dampak secara langsung terhadap peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian tanaman pangan yang merupakan faktor dominan dalam mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

Untuk memperoleh tingkat capaian dari sasaran strategis meningkatnya pelayanan jaringan transportasi, komunikasi, informasi dan telematika yang diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja, hasil rata-rata tingkat capaian sebesar 97,40%. Hal ini menunjukkan kinerja dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana bidang perhubungan darat, laut dan udara guna kelancaran arus transportasi antar daerah semakin meningkat sehingga dapat terbuka keterisolasian daerah terpencil dan kepulauan.

Dalam pencapaian sasaran strategis pengembangan pertambangan dan energi yang diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja, diperoleh hasil capaian rata-rata sebesar 91,67%. Tingkat pencapaian tersebut termasuk dalam kategori baik yang ditandai dengan keberhasilan dalam pembangunan beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang merupakan sumber energi alternatif dalam rangka pemenuhan kebutuhan kelistrikan.

Terhadap sasaran strategis tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja,

diperoleh hasil rata-rata sebesar 59,79%. Tingkat capaian dimaksud merupakan pembuktian bahwa dampak dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah dapat dikurangi, meskipun belum sebanding dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan akibat pengelolaan lingkungan hidup.

Hasil pengukuran terhadap 4 indikator kinerja yang merupakan target pencapaian sasaran strategis peningkatan perluasan akses dan pemerataan pendidikan, diperoleh hasil rata-rata sebesar 99,52%. Tingkat capaian ini menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni terhadap pendidikan termasuk kategori cukup baik terutama dalam mendukung program wajib belajar 9 tahun.

Sedangkan untuk sasaran strategis peningkatan mutu dan daya saing pendidikan, yang diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja, diperoleh hasil rata-rata sebesar 105,92%. Salah satu pendukung dalam pencapaian sasaran ini, diperoleh dari peningkatan nilai UN SMA/MA/SMK yang lebih tinggi dari rata-rata nasional nilai UN.

Berkaitan dengan dengan sasaran strategis peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan yang diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja, tingkat capaian dapat diperoleh rata-rata sebesar 107,46%. Hasil pencapaian terhadap sasaran ini didukung dengan penurunan angka kematian bayi dan kematian ibu melahirkan serta meningkatnya pelayanan kesehatan bagi penduduk Aceh.

Hasil pengukuran sasaran strategis peningkatan kualitas dan pelayanan kesejahteraan sosial yang diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja, tingkat capaian diperoleh rata-rata sebesar 99,89%. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran ini telah berimplikasi positif untuk mengurangi dan mengantisipasi penambahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan syariat Islam yang diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, dapat diperoleh tingkat capaian rata-rata sebesar 97,34%. Hal ini menunjukkan untuk penegakan hukum syariah di Aceh dilaksanakan secara konsekuen dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk penerapan Syariat Islam.

Tingkat pencapaian sasaran strategis peningkatan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien yang diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja, dapat diperoleh hasil rata-rata sebesar 90,65%. Pencapaian ini dapat dikategorikan cukup optimal yang tercermin dengan semakin intensif dilakukan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, penyelesaian pengaduan masyarakat, dan pengaturan regulasi yang berkaitan dengan kebijakan daerah, sehingga tujuan penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik dapat lebih ditingkatkan.

Hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis peningkatan penanganan dan pengurangan risiko bencana, dapat dicapai rata-rata sebesar 90%. Tingkat pencapaian sasaran ini termasuk kategori sangat baik, karena secara nyata melalui kegiatan yang dilakukan telah mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana serta mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi dan menangani kebencanaan.

Berdasarkan hasil pencapaian dari 14 sasaran strategis, secara akumulatif tingkat capaian rata-rata dapat diperoleh sebesar 92,18%. Tingkat pencapaian yang relatif baik merupakan keberhasilan dalam pencapaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun 2007-2012
untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh.

Banda Aceh, Maret 2012

PENJABAT GUBERNUR ACEH

Ir. TARMIZI A. KARIM, M.Sc

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY	iii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Daerah	2
C. Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur	3
1. Kelembagaan	3
2. Sumberdaya Aparatur	6
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. Perencanaan	10
B. Indikator Kinerja Utama	14
C. Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Pengukuran Kinerja	18
B. Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama	19
C. Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis	30
D. Akuntabilitas Keuangan	73
BAB IV PENUTUP	76
LAMPIRAN 1 PENGUKURAN KINERJA	
LAMPIRAN 2 PENETAPAN KINERJA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Aceh	4
Tabel 1.2	Jenjang Eselonering Jabatan Struktural dilingkungan Pemerintah Aceh	6
Tabel 1.3	Jumlah PNS berdasarkan golongan dan jenis kelamin.....	6
Tabel 1.4	Jumlah PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	7
Tabel 3.1	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.....	19
Tabel 3.2	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sumber daya energi pendukung investasi	21
Tabel 3.3	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang pembangunan peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar	23
Tabel 3.4	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan Kesehatan	25
Tabel 3.5	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang pembangunan syariat Islam, sosial dan budaya.....	26
Tabel 3.6	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Penciptaan Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Penyehatan Birokrasi Pemerintahan	28
Tabel 3.7	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang penanganan dan pengurangan resiko bencana	30
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	31
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	42
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	46

Tabel 3.11	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4	49
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5	51
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6	53
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7	55
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8	57
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9	59
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10	61
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11	63
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12	65
Tabel 3.20	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13	67
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14	71
Tabel 3.22	Rencana dan Realisasi Anggaran Pendapatan Aceh Tahun 2011	74
Tabel 3.23	Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja Aceh Tahun 2011	75



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi.



Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Aceh Tahun 2011 merupakan hasil pencapaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Aceh tahun 2011 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2007-2012.

B. KONDISI DAERAH

Secara geografis, Aceh terletak di ujung barat laut Sumatera pada posisi 2° - 6° Lintang Utara dan 95° - 98° Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Posisi ini sangat strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan dan kebudayaan yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat. Provinsi Aceh dengan Ibukota Banda Aceh, memiliki luas wilayah $58.375,63 \text{ km}^2$ atau 12,26% dari luas pulau Sumatera. Dari luas wilayah tersebut, seluas 3.523.817 Ha merupakan lahan hutan, seluas 691.102 Ha merupakan lahan perkebunan besar, sedangkan seluas 3.928 Ha merupakan lahan industri.

Secara topografi, Aceh memiliki wilayah bergunung sekitar 47,58%, wilayah datar 24,63%, wilayah berbukit 10,25%, wilayah berombak 10,55% dan selebihnya merupakan wilayah bergelombang. Adapun batas-batas wilayah Aceh sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Selat Malaka;
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara;
- Sebelah Timur dengan Selat Malaka; dan
- Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.



Penduduk Aceh sampai dengan pertengahan tahun 2011 berjumlah 4.953.262 jiwa yang tersebar dalam 23 kabupaten/kota yaitu terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota, 276 Kecamatan, 754 Mukim dan 6.423 Gampong.

C. KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA APARATUR

1. Kelembagaan

Sebagai daerah otonomi khusus, Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri urusan wajib dan urusan pilihan, dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh yang terdiri dari 7 Sekretariat, 18 Dinas dan 18 Lembaga Teknis Daerah yang ditetapkan dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Qanun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia Aceh.



Adapun nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Aceh sebagaimana tabel 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.1
Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Aceh

No.	Satuan Kerja Perangkat Aceh	
I	Sekretariat terdiri dari :	
	1	Sekretariat Daerah Aceh
	2	Sekretariat DPRA
	3	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
	4	Sekretariat Majelis Adat Aceh
	5	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
	6	Sekretariat Baitul Mal
	7	Sekretariat DPP KORPRI Aceh
II	Dinas terdiri dari :	
	1	Dinas Syariat Islam
	2	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
	3	Dinas Kesehatan
	4	Dinas Pertambangan dan Energi
	5	Dinas Kelautan dan Perikanan
	6	Dinas Sosial
	7	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh
	8	Dinas Pendidikan
	9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	10	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika
	11	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	12	Dinas Pengairan
	13	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya
	14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM



No.	Satuan Kerja Perangkat Aceh	
	15	Dinas Pemuda dan Olahraga
	16	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	17	Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan
	18	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
III	Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :	
	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	2	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
	3	Badan Arsip dan Perpustakaan
	4	Badan Pemberdayaan Masyarakat
	5	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	6	Badan Investasi dan Promosi
	7	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	8	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
	9	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
	10	Badan Pembinaan Pendidikan Dayah
	11	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
	12	Badan Penanggulangan Bencana Aceh
	13	Inspektorat Aceh
	14	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
	15	Rumah Sakit Jiwa
	16	Rumah Sakit Ibu dan Anak
	17	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
	18	Kantor Penghubung Pemerintah Aceh

Sumber : Biro Organisasi Setda Aceh Januari 2012

Berdasarkan besaran organisasi Satuan Kerja Perangkat Aceh sebagaimana tersebut di atas, maka terdapat sebanyak 1.235 jabatan struktural menurut jenjang eselonering sebagaimana tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2
Jenjang Eselonering Jabatan Struktural
di lingkungan Pemerintah Aceh

No	Eselonering	Jumlah
1	I.b	1
2	II.a	41
3	II.b	19
4	III.a	308
5	III.b	31
6	IV.a	835
Total		1.235

Sumber Biro Organisasi Setda Aceh Januari 2012

2. Sumberdaya Aparatur

Pemerintah Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diintegrasikan dalam Satuan Kerja Perangkat Aceh didukung sumber daya aparatur sebanyak 9.016 orang Pegawai Negeri Sipil dengan komposisi menurut golongan dan jenis kelamin sebagaimana tercantum dalam tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Jumlah PNS berdasarkan golongan dan jenis kelamin

No	GOLONGAN	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	IV	650	190	840	9,32
2	III	3.140	1.972	5.112	56,70
3	II	1.822	1.079	2.901	32,18
4	I	154	9	163	1,81
JUMLAH		5.766	3.250	9.016	100,00

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Aceh, keadaan Januari 2012



Berdasarkan tabel 3 di atas, jumlah Pegawai Negeri Sipil laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil perempuan, sedangkan menurut golongan jumlah Pegawai Negeri Sipil lebih didominasi golongan III.

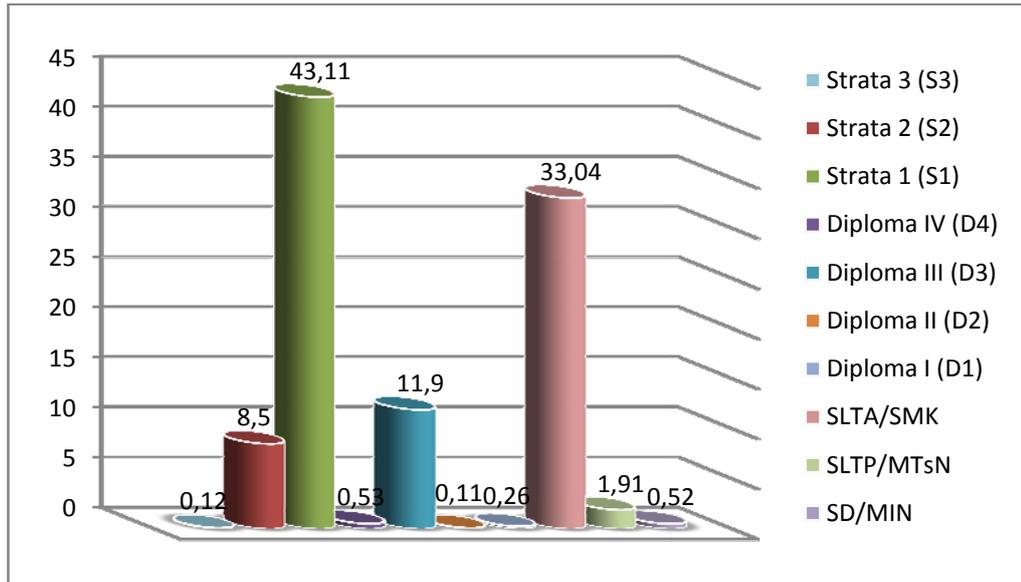
Berdasarkan kualifikasi pendidikan, jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Aceh dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4
Jumlah PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah PNS	Persentase
1	Strata 3	11	0,12
2	Strata 2	766	8,50
3	Strata 1	3.887	43,11
4	Diploma IV	48	0,53
5	Diploma III	1.073	11,90
6	Diploma II	10	0,11
7	Diploma I	23	0,26
8	SLTA/SMK	2.979	33,04
9	SLTP/MTsN	172	1,91
10	SD/MIN	47	0,52
JUMLAH		9.016	100,00

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan & Pelatihan Aceh Januari 2012.

Berdasarkan tabel 4 di atas, jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kualifikasi pendidikan Strata-1 dan SLTA/SMK lebih dominan dibandingkan dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi pendidikan lainnya, sebagaimana tergambar dalam diagram berikut ini.



D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Aceh Tahun 2011 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisikan latar belakang, kondisi daerah, kelembagaan dan sumber daya aparatur, sistematika penulisan

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Berisikan uraian mengenai perencanaan, indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan tentang realisasi capaian Indikator Kinerja Utama, dan capaian hasil pengukuran kinerja sasaran.

Bab IV Penutup

Lampiran

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007–2012 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun 2007-2012, Pemerintah Aceh telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan tahun 2011 yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target pencapaian kinerja pada tahun 2011. Sasaran, program dan indikator kinerja setiap kegiatan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh tahun 2011 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 27 tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh tahun 2011.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan RKPA yang mengacu pada RPJMA 2007-2012, sasaran strategis pembangunan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, Pemerintah Aceh masih menitikberatkan pada 7 (tujuh) prioritas pembangunan, yaitu :

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sumber daya energi pendukung investasi
3. Peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar
4. Peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan
5. Pembangunan syariat Islam, sosial dan budaya
6. Penciptaan pemerintahan yang baik dan bersih, serta penyehatan birokrasi pemerintahan.
7. Penanganan dan pengurangan risiko bencana

Sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah Aceh dan DPRA Nomor 25/PKS/2010 dan Nomor 900/2806/DPRA/2010 tanggal 12 November 2010, telah ditetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (KU-APBA) tahun 2011, kebijakan dalam penyusunan APBA tahun 2011 dilakukan untuk mewujudkan sinkronisasi kebijakan anggaran dengan rencana kerja dan rencana kinerja tahunan pemerintah Aceh, mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dengan target capaian kinerja yang terukur, berdampak positif dan strategis untuk percepatan pembangunan Aceh.

Kebijakan pembangunan Aceh tahun 2011, diarahkan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan secara makro yang tertuang dalam RPJMA tahun 2007-2012 terutama target pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai antara 5,5-6,0% melalui penguatan 4 (empat) prioritas dari 7 (tujuh) prioritas pembangunan Aceh, yaitu *pertama* pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan; *kedua* pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sumber daya energi pendukung investasi; *ketiga* peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar; dan *keempat* peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Sedangkan 3 (tiga) prioritas pembangunan lainnya yaitu *pertama* pembangunan syariat Islam, sosial dan budaya; *kedua* penciptaan pemerintahan yang baik dan bersih serta penyehatan birokrasi pemerintahan; dan *ketiga* penanganan dan pengurangan risiko bencana, tetap dilaksanakan sebagai pendukung yang menjadi penguatan 4 (empat) prioritas pembangunan yang berkaitan dengan pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

Untuk pencapaian sasaran dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan, diarahkan melalui kebijakan :

1. Peningkatan produksi pertanian dan perikanan, dengan fokus utama pada peningkatan hasil komoditi unggulan daerah.
2. Pembangunan serta peningkatan sarana dan prasarana ekonomi publik.
3. Penguatan sistem penyuluhan pertanian serta kelembagaan petani dan nelayan, melalui peningkatan sarana penyuluhan dan SDM.
4. Peningkatan kompetensi tenaga kerja, diutamakan pada para pemuda putus sekolah sehingga tersedianya tenaga kerja siap pakai.
5. Pemberdayaan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah serta perkoperasian, terutama pada peningkatan kompetensi dan iklim usaha yang kondusif.

Adapun kebijakan pokok yang akan ditempuh dalam kaitannya dengan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik serta implementasi pendidikan berbasis nilai-nilai islami, dilakukan melalui :

1. Perluasan akses pelayanan pendidikan.
2. Peningkatan mutu pendidikan.
3. Pembinaan dan pengembangan pendidikan dayah.

Kebijakan dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sumber daya energi pendukung investasi, diarahkan melalui :

1. Pembangunan prasarana jalan dan jembatan, yang diutamakan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan transportasi barang dan jasa serta membuka keterisolasian wilayah.
2. Pembangunan keciptakarya, diprioritaskan pada pembangunan rumah dhuafa, pembangunan prasarana air bersih, serta pembangunan fasilitas umum lainnya.
3. Pembangunan sumber daya air, diarahkan dalam upaya

pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang berkelanjutan dan partisipatif untuk mewujudkan sistem irigasi yang handal.

4. Pembangunan perhubungan, komunikasi, informasi dan telematika, dititikberatkan pada peningkatan, pengembangan dan pelayanan secara terpadu sektor perhubungan darat, laut dan udara.
5. Pembangunan lingkungan hidup, dengan fokus utama pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
6. Pembangunan pertambangan dan energi, diarahkan pada penyediaan listrik yang cukup bagi rumah tangga dan industri, penyediaan dan pengendalian kualitas air tanah.

Kebijakan pokok yang ditempuh dalam peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan, diarahkan pada pembenahan sektor pelayanan dasar dan pelayanan rujukan serta penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai.

Sedangkan kebijakan dalam prioritas pembangunan syariat Islam, sosial dan budaya, diarahkan pada peningkatan pemahaman kesadaran pelaksanaan syariat Islam serta pengembangan potensi khasanah budaya yang khas dan unik. Untuk penciptaan pemerintahan yang baik dan bersih, serta penyehatan birokrasi pemerintahan, kebijakan yang ditempuh diarahkan melalui pencegahan kebocoran dan pemborosan dalam penggunaan keuangan Negara. Berkaitan dengan penanganan dan pengurangan risiko bencana, kebijakan yang dilakukan lebih diarahkan pada pengurangan risiko bencana, penanganan tanggap darurat serta pelaksanaan koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 mengamanatkan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai gambaran pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun.

Untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Aceh, telah dirumuskan Indikator Kinerja Utama guna mengukur pencapaian target sasaran strategis, telah ditetapkan 26 Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. Tingkat Pertumbuhan ekonomi dengan migas ditargetkan sebesar 3%
2. Pertumbuhan ekonomi tanpa migas dengan target sebesar 6%
3. Tingkat pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan dengan migas, ditargetkan sebanyak 34,1 triliun.
4. Tingkat pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan non migas, dengan target sebanyak 30,8 triliun
5. Penurunan angka pengangguran ditargetkan sebesar 1%
6. Penurunan angka penduduk miskin ditargetkan sebesar 1,98%.
7. Peningkatan produksi sektor pertanian dan perikanan ditargetkan sebesar 1,08%.
8. Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik sepanjang 161,14 Km.
9. Panjang jembatan dalam kondisi baik sepanjang 2.072,07 Meter
10. Luas cakupan irigasi dalam kondisi baik seluas 41.887 Ha
11. Ketersediaan fasilitas perhubungan komunikasi informasi dan telematika yang memenuhi SPM sebesar 100%
12. Jumlah pengembangan energi alternatif/ terbarukan sebanyak 4 lokasi
13. Peningkatan APM SD/ MI/ SDLB dengan target 96,50%
14. Peningkatan APK SMP/ MTs/ SMPLB dengan target 98,50%

15. Rata-rata nilai UN SMA/MA dengan nilai 7,40
16. Jumlah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tingkat SMP, SMA, dan SMK sebanyak 22 unit.
17. Rasio Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup ditargetkan sebesar 24 per 1.000 Kelahiran Hidup
18. Angka Usia harapan hidup ditargetkan menjadi 72 tahun
19. Penanganan pelanggaran syariat islam sebanyak 150 Kasus
20. Jumlah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebanyak 2.145 orang
21. Jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 987.250 orang
22. Jumlah produk hukum daerah yang diundangkan/ ditetapkan sebanyak 835 Dokumen
23. Jumlah tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan sebanyak 153 LHP
24. Tingkat Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap APBA sebesar 10%
25. Tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat sebesar 100%
26. Tingkat penanganan dan pengurangan risiko bencana sebesar 50 %

C. PERJANJIAN KINERJA

Pemerintah Aceh telah menetapkan target pencapaian kinerja tahun 2011 dalam bentuk penetapan kinerja yang merupakan perjanjian kinerja pemerintah Aceh sebagai salah satu dokumen dalam pelaksanaan sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan indikator dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Adapun sasaran strategis yang menjadi perjanjian kinerja secara umum telah mengacu pada sasaran dan indikator sebagaimana tertuang dalam RPJMA yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja

Tahunan, Rencana Kerja Pemerintah Aceh dan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2011, dapat dirinci sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan menurunnya angka kemiskinan.
2. Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan sarana/ prasarana permukiman
3. Meningkatnya ketepatan bangunan irigasi, pengaman pantai dan normalisasi sungai
4. Meningkatnya pelayanan jaringan transportasi, komunikasi, informasi dan telematika
5. Meningkatnya pengembangan pertambangan dan energi yang berkelanjutan
6. Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
7. Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan
8. Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan
9. Meningkatnya mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat
10. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan syariat Islam
11. Meningkatnya pengembangan destinasi, apresiasi budaya dan adat istiadat
12. Meningkatnya kualitas dan pelayanan kesejahteraan sosial
13. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien
14. Meningkatnya penanganan dan pengurangan resiko bencana

Berdasarkan sasaran pembangunan Pemerintah Aceh tahun 2011, secara rinci sasaran strategis, indikator kinerja beserta target capaian dijabarkan dalam penetapan kinerja terdiri dari 14 sasaran strategis, 58 Indikator kinerja dan 58 target capaian yang merupakan perjanjian



kinerja tahun 2011. Untuk pencapaian sasaran strategis dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.969.411.045.782,- atau sebesar 62,27% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun 2011 sebesar Rp.7.979.778.571.000,-. Dokumen penetapan kinerja merupakan lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Aceh tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran 2.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan untuk melihat tingkat akuntabilitas kinerja dalam pencapaian perjanjian kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan indikator kinerja utama dan penetapan kinerja tahun 2011.

Pengukuran indikator kinerja utama dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan, sedangkan pengukuran penetapan kinerja lebih dititikberatkan pada sasaran strategis pembangunan yang menjadi target pencapaian tahun 2011, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target capaian yang telah ditetapkan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran, Indikator Kinerja Utama dikelompokkan berdasarkan pada 7 (tujuh) prioritas pembangunan, *pertama* pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama; *kedua* Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sumber daya energi pendukung investasi dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama; *ketiga* peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama; *keempat* peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama; *kelima* pembangunan syariat Islam, sosial dan budaya dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama; *keenam* penciptaan pemerintahan yang baik dan bersih serta penyehatan birokrasi pemerintahan dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama; dan *ketujuh* penanganan dan pengurangan risiko bencana dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama. Sedangkan untuk memperoleh hasil pengukuran penetapan kinerja dilakukan pada setiap indikator kinerja yang dikelompokkan berdasarkan sasaran strategis.

B. Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 26 Indikator Kinerja Utama, tingkat capaian setiap Indikator Kinerja Utama sesuai pengelompokan menurut prioritas pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tingkat capaian indikator Kinerja Utama bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan sebagaimana tabel 3.1 :

Tabel 3.1
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama
Bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat,
perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Tingkat Capaian	
				Realisasi	%
1.	Tingkat Pertumbuhan ekonomi dengan migas	%	3	1,31 ¹⁾	43,67
2.	Pertumbuhan ekonomi tanpa migas	%	6	1,55 ¹⁾	25,83
3.	Tingkat pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan dengan migas	Triliun	34,1	8,52 ¹⁾	24,99
4.	Tingkat pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan non migas	Triliun	30,8	7,52 ¹⁾	24,42
5.	Penurunan angka pengangguran	%	1,00	0,19	19,00
6.	Penurunan angka penduduk miskin	%	1,98	1,41	71,21
7.	Peningkatan produksi sektor pertanian dan perikanan	%	1,08	1,46	135,19

¹⁾ Triwulan I tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh gambaran pencapaian terhadap indikator kinerja utama tingkat pertumbuhan ekonomi dengan migas, dari target 3% sampai dengan triwulan pertama tahun 2011 dapat

direalisasikan sebesar 1,31% dengan tingkat capaian sebesar 43,67%. Realisasi dimaksud sesuai dengan data hasil perhitungan dan publikasi lembaga yang menjadi sumber data, sedangkan realisasi tingkat capaian secara riil sampai dengan akhir tahun 2011 belum dapat diperoleh.

Demikian juga terhadap capaian indikator kinerja utama pertumbuhan ekonomi tanpa migas, realisasi sampai dengan triwulan pertama tahun 2011 baru tercapai sebesar 1,55% dari target sebesar 6% atau dengan tingkat capaian sebesar 25,83%.

Sedangkan realisasi dari indikator kinerja utama pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan dengan migas juga masih didasari pada realisasi triwulan pertama tahun 2011 sebesar 8,52 triliun rupiah dari target sebesar 34,1 triliun rupiah sehingga tingkat capaian yang diperoleh hanya sebesar 24,99%.

Pencapaian terhadap indikator kinerja tingkat pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan non migas dengan target sebesar 30,8 triliun rupiah, sampai dengan triwulan pertama tahun 2011 mampu direalisasikan sebesar 7,52 triliun rupiah dengan tingkat capaian sebesar 24,42%.

Hasil pengukuran terhadap target indikator kinerja utama penurunan angka pengangguran yang ditetapkan sebesar 1,00% dapat direalisasikan sebesar 0,19% atau 19,00%. Hambatan yang dihadapi pemerintah Aceh dalam upaya menekan angka pengangguran antara lain peningkatan jumlah angkatan kerja dan pencari kerja belum sebanding dengan penyediaan lapangan kerja, meskipun telah dilakukan berbagai upaya melalui pelaksanaan fasilitasi bantuan peralatan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.

Penurunan angka penduduk miskin yang merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam bidang pemberdayaan ekonomi

masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan yang ditargetkan untuk tahun 2011 sebesar 1,98%, dengan realisasi sebesar 1,41% atau 71,21%. Dengan demikian angka penduduk miskin dari 20,98% pada tahun 2010 hanya dapat ditekan sebesar 0,73%, sehingga sampai akhir tahun 2011 jumlah penduduk miskin masih berkisar sebesar 20,25%.

Indikator kinerja utama peningkatan produksi sektor pertanian dan perikanan pada tahun 2011 yang ditargetkan dapat meningkat rata-rata sebesar 1,08%, mampu direalisasikan sebesar 1,46% dengan tingkat capaian sebesar 135,19%. Kontribusi dominan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja utama ini sangat ditentukan adanya keberhasilan dalam usaha intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan.

2. Tingkat capaian Indikator Kinerja Utama bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sumber daya energi pendukung investasi sebagaimana tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama
Bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan
sumber daya energi pendukung investasi

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Tingkat Capaian	
				Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik	Km	161,14	159,80	99,17
2.	Panjang jembatan dalam kondisi baik	Meter	2.072,07	2.061,50	99,49
3.	Luas cakupan irigasi dalam kondisi baik	Ha	41.887	41.887	100,00
4.	Ketersediaan fasilitas Perhubungan komunikasi informasi dan telematika yang memenuhi SPM	%	100	87	87,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Jumlah pengembangan energi alternatif/terbarukan	Lokasi	4	3	75,00

Pencapaian indikator kinerja utama panjang jalan provinsi dalam kondisi baik, yang ditargetkan pada tahun 2011 sepanjang 161,14 Km, dan dapat direalisasikan sepanjang 159,80 Km atau sebesar 99,17%. Tingkat capaian tersebut menunjukkan kualitas jalan sebagai sarana transportasi semakin meningkat dan dapat membuka aksesibilitas antar wilayah dalam rangka memperlancar arus transportasi barang dan jasa.

Untuk indikator kinerja utama panjang jembatan dalam kondisi baik, realisasi dapat dicapai sepanjang 2.061,50 meter dari target yang ditetapkan sepanjang 2.072,07 meter dengan tingkat capaian sebesar 99,49%. Tingkat capaian relatif baik dalam realisasi indikator ini, karena setiap pelaksanaan pembangunan jembatan disinergikan dengan perencanaan dan pembangunan jalan.

Terhadap indikator kinerja utama luas cakupan irigasi dalam kondisi baik, dalam tahun 2011 yang ditargetkan seluas 41.887 hektar mampu direalisasikan 100%. Hal ini menunjukkan luas cakupan irigasi dalam kondisi baik semakin bertambah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga cakupan lahan pertanian yang diairi akan terjangkau lebih luas dan sangat mempengaruhi tingkat produksi pertanian.

Tingkat capaian indikator kinerja utama ketersediaan fasilitas perhubungan, komunikasi, informasi dan telematika yang memenuhi SPM, hanya dapat direalisasikan sebesar 87% dari target yang direncanakan 100%. Kekurangan realisasi sebesar 13% antara lain disebabkan target capaian yang ditetapkan mengacu pada target capaian SPM yang secara bertahap harus tercapai pada tahun 2014

sehingga pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara belum mendapat penganggaran yang optimal pada tahun 2011 melainkan dilakukan perencanaan secara bertahap.

Dari 4 (empat) lokasi yang ditargetkan dalam indikator kinerja utama jumlah pengembangan energi alternatif/terbarukan, dapat direalisasikan 3 (tiga) lokasi pengembangan energi alternatif, atau dengan tingkat capaian sebesar 75%. Hal ini disebabkan salah satu lokasi yaitu rencana pengembangan PLTA di Lawe Mamas Kabupaten Aceh Tenggara tidak dapat dilaksanakan karena termasuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

3. Tingkat capaian indikator Kinerja Utama bidang peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar sebagaimana tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama
Bidang pembangunan peningkatan mutu pendidikan dan
pemerataan kesempatan belajar

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Tingkat Capaian	
				Realisasi	%
1.	Peningkatan APM SD/ MI/ SDLB	%	96,50	98,52	102,09
2.	Peningkatan APK SMP/ MTs/ SMPLB	%	98,50	100,89	102,43
3.	Rata-rata nilai UN SMA/MA	Nilai	7,40	7,46	100,81
4.	Jumlah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tingkat SMP, SMA, dan SMK	Unit	22	28	127,27

Indikator kinerja utama peningkatan APM SD/MI/SDLB, Pemerintah Aceh menargetkan sebesar 96,50%, mampu direalisasi sebesar 98,52%, atau dengan tingkat capaian sebesar 102,09%. Tingkat

pencapaian yang cukup baik terhadap indikator peningkatan APM SD/MI/SDLB sangat mendukung dalam pembangunan dan peningkatan pemerataan kesempatan belajar, hal ini menunjukkan angka partisipasi murni terhadap wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dapat terus ditingkatkan. Untuk peningkatan pemerataan kesempatan belajar dan menghindari disparitas pendidikan telah dilakukan melalui penyebaran pembangunan sekolah dan pemerataan guru sampai ke daerah-daerah terisolir, terpencil, perbatasan dan kepulauan terutama tingkat sekolah dasar.

Pencapaian terhadap indikator kinerja utama peningkatan APK SMP/MTs/SMPLB, dari target 98,50%, dengan realisasi 100,89% atau tingkat capaian 102,43%, dapat membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan tingkat menengah telah secara nyata dapat diwujudkan, meskipun belum mencapai standar pelayanan dasar sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu Pemerintah Aceh akan terus mengembangkan strategi yang tepat sehingga sasaran dalam mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan dapat dipenuhi dan dicapai sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Tingkat capaian indikator kinerja utama rata-rata nilai UN SMA/MA, dapat diperoleh 7,46 dari target yang telah ditetapkan 7,40 dengan tingkat capaian sebesar 100,81%. Tingkat capaian ini menunjukkan bahwa mutu dan daya saing pendidikan dapat dikategorikan cukup baik, karena nilai rata-rata UN yang diperoleh lebih tinggi 0,59 dari rata-rata nasional nilai UN 6,87, meskipun kemampuan daya saing untuk berkompetisi secara global masih tergolong rendah.

Untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan juga dilakukan melalui pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional, pada tahun

2011 telah dilakukan dengan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) sehingga untuk indikator jumlah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tingkat SMP, SMA, dan SMK yang ditargetkan sebanyak 22 sekolah dapat direalisasikan sebanyak 28 sekolah dengan tingkat capaian sebesar 127,27%, yang tersebar di beberapa kabupaten/kota.

4. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama bidang peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan, tingkat pencapaian dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama
Bidang peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Tingkat Capaian	
				Realisasi	%
1.	Rasio Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Rasio/ 1.000 LH	24	16,3	132,08
2.	Angka Usia harapan hidup	Tahun	72	71	98,61

Tingkat capaian indikator kinerja utama rasio angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dari target 24 per 1.000 kelahiran hidup dapat direalisasikan 16,3 per 1.000 kelahiran hidup atau tingkat capaian sebesar 132,08%. Persentase perolehan capaian dimaksud menunjukkan keberhasilan yang cukup signifikan dalam menekan angka kematian bayi setiap per 1.000 kelahiran hidup, hal ini bermakna dengan realisasi 16,3 per 1.000 kelahiran hidup jauh lebih berhasil dari rasio target yang ditetapkan pada tahun 2011 sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup. Perhitungan untuk capaian indikator ini dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dari indikator kinerja utama yaitu

semakin rendah angka realisasi berarti menunjukkan semakin tinggi tingkat capaian kinerja.

Berkenaan dengan rencana peningkatan indikator kinerja utama angka usia harapan hidup yang ditargetkan pada tahun 2011 menjadi 72 tahun, namun realisasi yang dapat dicapai hanya menjadi 71 tahun atau 98,61%. Dengan demikian usia harapan hidup penduduk Aceh sampai dengan tahun 2011 masih berada di atas angka rata-rata usia harapan hidup secara nasional yang ditetapkan 68 tahun.

5. Terhadap hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja utama bidang Pembangunan Syariat Islam, sosial dan budaya, dapat digambarkan pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama
Bidang pembangunan syariat Islam, sosial dan budaya

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Tingkat Capaian	
				Realisasi	%
1.	Penanganan pelanggaran syariat islam	Kasus	150	160	106,67
2.	Jumlah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Orang	2.145	2.145	100,00
3.	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	987.250	987.199	99,99

Terhadap indikator kinerja utama jumlah penanganan pelanggaran syariat Islam yang ditindaklanjuti, dari 150 kasus yang ditargetkan dapat direalisasikan sebanyak 160 kasus dengan tingkat capaian sebesar 106,67%. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh, mengamanahkan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh harus diatur dengan Peraturan Daerah/Qanun termasuk didalamnya pengaturan mengenai sanksi hukum atas tindakan pelanggaran terhadap hukum syariah, maka setiap pelanggaran yang berkaitan dengan qhamar (miras), maisir (perjudian) dan khalwat (mesum), telah ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam Qanun Provinsi Aceh.

Tingkat capaian indikator kinerja utama jumlah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) indikator kinerja utama dalam bidang ini, dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan berjumlah 2.145 orang atau 100%. Tingkat capaian ini telah membawa dampak terhadap penanganan PMKS yang semakin bertambah banyak hingga tahun 2011 berjumlah 31.070 orang, sedangkan jumlah yang mampu ditangani hanya sebesar 6,90%. Upaya mengatasi penambahan jumlah PMKS akan terus dilakukan melalui program peningkatan kesejahteraan sosial lainnya yang mempengaruhi secara langsung penurunan jumlah PMKS.

Pencapaian terhadap indikator kinerja utama jumlah kunjungan wisatawan yang ditargetkan berjumlah 987.250 orang dapat direalisasikan berjumlah 987.199 orang atau sebesar 99,99%. Tingkat pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa Sektor pariwisata mengalami peningkatan cukup signifikan, hal ini tercermin dari jumlah wisatawan manca Negara dan domestik yang berkunjung ke Aceh terus meningkat. Pada tahun 2011 jumlah wisatawan manca Negara mencapai 28.053 orang atau meningkat sebesar 26,40% dibandingkan dengan tahun 2010 berjumlah 20.648 orang, demikian juga terhadap jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Aceh sebanyak

959.146 orang atau meningkat sebesar 24,92% dari jumlah tahun 2010 sebanyak 720.079 orang.

6. Tingkat capaian indikator Kinerja Utama bidang Penciptaan Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Penyehatan Birokrasi Pemerintahan, sebagaimana tabel 3.6 :

Tabel 3.6
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama
Bidang Penciptaan Pemerintahan yang Baik dan Bersih
serta Penyehatan Birokrasi Pemerintahan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Tingkat Capaian	
				Realisasi	%
1.	Jumlah produk hukum daerah yang diundangkan/ditetapkan	Dokumen	835	806	96,53
2.	Jumlah tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan	LHP	153	136	88,89
3.	Tingkat Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap APBA	%	10,00	10,84	108,40
4.	Tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100%	85,71 %	85,71

Tingkat capaian indikator kinerja utama jumlah produk hukum daerah yang diundangkan/ditetapkan, dari target sebanyak 835 dokumen telah direalisasikan sebanyak 806 dokumen, dengan tingkat capaian sebesar 96,53%. Kekurangan realisasi ini disebabkan penyelesaian beberapa produk hukum antara lain Qanun yang telah ditetapkan menjadi program legislasi daerah tidak mendapat persetujuan bersama sehingga belum dapat diundangkan dalam tahun 2011. Demikian juga dengan beberapa kebijakan lainnya yang merupakan turunan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi masih dalam proses penyelesaian.

Terhadap indikator kinerja utama jumlah tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan, telah direalisasikan sebanyak 136 LHP atau 88,89% dari target yang ditetapkan sebanyak 153 LHP. Tingkat capaian indikator ini sudah menunjukkan upaya optimal pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta komitmen yang tinggi untuk menciptakan aparatur pemerintah yang bersih, kompeten dan berwibawa, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Berkaitan dengan pencapaian indikator kinerja utama tingkat kontribusi Pendapatan Asli Aceh (PAA) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) pada tahun 2011 dengan target sebesar 10,00% dapat direalisasikan sebesar 10,84% atau sebesar 108,40%. Tingkat capaian terhadap indikator kinerja utama ini relatif lebih baik dalam mendukung peningkatan kontribusi PAA terhadap APBA yaitu dengan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pencapaian Pendapatan Asli Aceh. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Pendapatan Asli Aceh sebesar Rp.799.451.065.471,20 dari target yang ditetapkan pada tahun 2011 sebesar Rp.797.284.999.424,- atau mencapai 100,27%. Dibandingkan dengan besaran APBA tahun 2011 setelah perubahan yang ditetapkan sebesar Rp.7.979.778.571.000,- dengan realisasi sebesar Rp.7.374.632.649.255,- atau 92,42%, maka tingkat kontribusi realisasi PAA terhadap APBA tahun 2011 baru mencapai sebesar 10,84%.

Terhadap indikator kinerja utama tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat ditargetkan sebesar 100%, dapat terealisasi sebesar 85,71% atau dengan tingkat capaian 85,71%. Tingkat capaian ini diperoleh berdasarkan jumlah pengaduan masyarakat pada tahun 2011 sebanyak 21 pengaduan dan yang telah diselesaikan secara tuntas

sebanyak 18 pengaduan, sedangkan 3 (tiga) pengaduan lainnya belum dapat ditangani dengan sempurna.

7. Tingkat capaian indikator Kinerja Utama bidang Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana, sebagaimana tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama
Bidang penanganan dan pengurangan resiko bencana

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Tingkat Capaian	
				Realisasi	%
1.	Tingkat penanganan dan pengurangan risiko bencana	%	50,00	40,00	80,00

Dalam hal pencapaian indikator kinerja utama tingkat penanganan dan pengurangan risiko bencana sampai dengan tahun 2011, dapat direalisasikan sebesar 40% dari target yang ditetapkan sebesar 50% dengan tingkat capaian sebesar 80%. Untuk target indikator ini, sasaran yang diharapkan adalah peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana dan kemampuan pemerintah serta masyarakat dalam penanganan kebencanaan.

C. Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian terhadap pengukuran indikator kinerja sasaran strategis diperoleh dari perbandingan antara tingkat capaian realisasi dengan target yang ditetapkan pada tahun 2011. Hasil pencapaian masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan menurunnya angka kemiskinan.	Persentase Pertumbuhan ekonomi dengan migas	3%	1,31 %	43,67
		Persentase Pertumbuhan ekonomi tanpa migas	6%	1,55 %	25,83
		Tingkat pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan dengan migas	34,1 T	8,52 T	24,99
		Tingkat pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan non migas	30,8 T	7,52 T	24,42
		Persentase penurunan angka pengangguran	1 %	0,19 %	19,00
		Persentase penurunan angka penduduk miskin	1,98 %	1,41 %	71,21
		Persentase peningkatan produksi sektor pertanian dan perikanan	1,08 %	1,46 %	135,19
		Jumlah investor dalam dan luar negeri	76 Prsh	75 Prsh	98,68

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja persentase pertumbuhan ekonomi dengan migas tahun 2011 yang ditargetkan 3% dapat direalisasikan sebesar 1,31% atau dengan tingkat capaian 43,67%. Realisasi dimaksud merupakan capaian pada triwulan pertama tahun 2011 dan menurut asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi dengan migas pada akhir tahun 2011 akan dicapai 5,24% atau di atas target yang telah ditetapkan.

Tingkat capaian indikator persentase pertumbuhan ekonomi tanpa migas yang ditargetkan sebesar 6% hingga triwulan pertama tahun 2011 telah dapat direalisasikan sebesar 1,55% atau 25,83%. Menurut perkiraan realisasi pada akhir tahun 2011 dapat mencapai sebesar

6,20% atau melampaui target yang ditetapkan, berdasarkan proyeksi tingkat pertumbuhan rata-rata periode 2009-2010 sebesar 5,32%.

Pencapaian indikator kinerja tingkat pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan dengan migas keadaan triwulan pertama tahun 2011 baru mencapai 24,99% dengan angka realisasi Rp.8,52 triliun dari target Rp.34,1 triliun. Angka realisasi ini menunjukkan peningkatan yang relatif baik berdasarkan perbandingan triwulan IV tahun 2010 sebesar Rp.8,48 triliun menjadi Rp.8,52 triliun pada triwulan I tahun 2011, sehingga dapat diproyeksikan perkembangan kondisi perekonomian Aceh akan terus meningkat pertumbuhannya sesuai dengan yang diharapkan.

Demikian juga proyeksi terhadap indikator kinerja tingkat pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan non migas dari target Rp.30,8 triliun sampai dengan triwulan pertama tahun 2011 telah dapat direalisasikan sebesar Rp.7,52 triliun atau 24,42%. Menurut data perkiraan tingkat capaian sasaran dengan indikator ini menunjukkan relatif lebih baik atau mengalami peningkatan dibandingkan tingkat capaian pada triwulan IV tahun 2010 sebesar Rp.7,47 triliun. Sesuai dengan hasil pencapaian pada triwulan I tahun 2011, maka dapat diasumsikan tingkat pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan non migas pada akhir tahun 2011 akan dapat dicapai Rp.30,8 triliun atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Terhadap pencapaian indikator kinerja persentase penurunan angka pengangguran dengan target sebesar 1% mampu direalisasikan sebesar 0,19% atau dengan tingkat capaian sebesar 19,00%. Hal ini menggambarkan bahwa pencapaian kinerja terhadap indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan. Faktor utama yang

mempengaruhi pencapaian target indikator kinerja ini antara lain lambannya pertumbuhan investasi sektor industri manufaktur yang banyak menyerap tenaga kerja, belum berkembangnya sektor dunia usaha lainnya, dan pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Aceh telah melakukan beberapa terobosan antara lain melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja dengan sasaran utamanya adalah pemuda putus sekolah sehingga tersedianya tenaga kerja yang siap pakai baik untuk kebutuhan daerah maupun pemenuhan kebutuhan luar negeri, sedangkan tenaga kerja yang sedang menganggur ditingkatkan kemampuan skill sesuai dengan bakat dan permintaan pasar melalui pelatihan kompetensi dan pemagangan. Peningkatan kompetensi juga diikuti oleh upaya peningkatan sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja melalui pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK).

Untuk kegiatan pelatihan pada tahun 2011 telah dilakukan antara lain pelatihan aneka kejuruan sebanyak 340 pemuda putus sekolah, pelatihan kewirausahaan sebanyak 100 orang, bantuan peralatan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja pada 3 kabupaten/kota, pembangunan sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja sebanyak 11 unit BLK pada 9 kabupaten/kota. Kegiatan lainnya yang telah dilakukan adalah pembangunan permukiman baru untuk masyarakat terkena musibah bencana alam, korban konflik, daerah terisolir, Daerah Aliran Sungai (DAS), daerah perbatasan, abrasi laut, perambah hutan, dhuafa dan petani/nelayan miskin yang tidak memiliki lahan garapan dan individu putus sekolah sebanyak 249 KK.

Meskipun berbagai strategi telah dilaksanakan dalam upaya penurunan angka pengangguran, namun target penurunan yang diharapkan pada tahun 2011 menjadi 8,27% dari keadaan pada tahun 2010 sebesar 8,37% belum dapat dipenuhi, akan tetapi secara kongkrit angka pengangguran dapat ditekan hanya sebesar 0,10%. Kondisi ini akan

menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan yang akan mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Persentase penurunan angka penduduk miskin yang ditargetkan sebesar 1,98% dan realisasi sebesar 1,41% dengan tingkat capaian sebesar 71,21%. Angka realisasi dimaksud merupakan hasil capaian sampai dengan pertengahan tahun 2011, maka dapat diprediksikan pada akhir tahun 2011 penurunan angka penduduk miskin yang ditargetkan menjadi 18-19% akan dapat dipenuhi. Perkembangan ini dapat dibuktikan dengan tingkat penurunan penduduk miskin yang cukup signifikan sejak tahun 2006-2011, karena jumlah penduduk miskin di Aceh pada tahun 2006 sebanyak 1.112.061 jiwa atau 26,66%, sedangkan angka penduduk miskin sampai dengan pertengahan tahun 2011 telah mampu diturunkan menjadi 19,57% atau 969.353 jiwa, sehingga dalam kurun waktu 2007-2011 angka penduduk miskin di Aceh menurun sebesar 7,07%.

Salah satu kebijakan pemerintah Aceh yang sangat mempengaruhi terhadap penurunan angka penduduk miskin melalui program Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2011 pemerintah Aceh telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 299.000.000.000,- kepada 5.980 gampong wilayah PNPM Mandiri Pedesaan masing-masing gampong sebesar Rp.50.000.000,- dengan penggunaan diarahkan untuk sarana dan prasarana dasar dengan kegiatan pembangunan fisik meliputi air bersih, bangunan dan sarana pelengkap, saluran, jalan desa, jembatan, listrik desa, MCK, pasar desa, sarana kesehatan dan pendidikan sebesar Rp.290.691.635.000 atau 97,22% dan non fisik Rp.24.000.000 atau 0,01%. Sedangkan

untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi berupa Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dalam bentuk modal usaha bagi kelompok perempuan dan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebesar Rp.8.284.365.000,- atau 2,77%.

Hal ini menunjukkan arah kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan yang dilaksanakan sangat mempengaruhi terhadap penurunan angka penduduk miskin.

Tingkat capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi sektor pertanian dan perikanan ditargetkan sebesar 1,08% dapat direalisasikan sebesar 1,46% atau dengan tingkat capaian 135,19%. Keberhasilan ini merupakan suatu indikasi komitmen pemerintah Aceh dalam melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dilakukan melalui peningkatan produksi dan produktifitas padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Untuk komoditi Padi yang ditargetkan sebanyak 1.702.459 ton mampu direalisasikan sebanyak 1.772.962 ton atau dengan tingkat capaian sebesar 104,14%. Pencapaian produksi padi yang melebihi target tidak terlepas dari peran Pemerintah Aceh dalam memberikan bantuan dan dukungan berupa saprodi seperti benih, pupuk, dan obat-obatan serta berbagai pelatihan kepada petani, dan infrastruktur lainnya yang mendukung peningkatan produksi, sehingga margin keuntungan yang diperoleh petani berkisar antara Rp.9,000,000,- s/d Rp.14,000,000,- per Ha.

Pada komoditi jagung pencapaian produksi berada dibawah target yang ditetapkan sebanyak 171.074 ton dengan realisasi sebanyak 168.860 ton atau 98,71%, hal ini disebabkan adanya pergeseran pengembangan komoditi di sentra-sentra produksi jagung seperti kabupaten Aceh Tenggara dan kabupaten Gayo Lues yang beralih kepada komoditi Kakao, selain itu komoditi jagung masih dianggap

komoditi yang kurang ekonomis dan kurang memberikan keuntungan dibandingkan dengan komoditi padi.

Terhadap komoditi kedele, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar belum mencapai target produksi yang ditetapkan, karena komoditi ini kurang ekonomis sehingga kurang menarik minat petani, disebabkan karena nilai jual masih rendah hanya berkisar Rp.4,000,- s/d Rp.5,000,- per kg untuk kedele, belum terdapat industri pengolahan kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar, sehingga hasil produksi ini hanya digunakan untuk keperluan industri rumah tangga.

Sebaliknya dilihat dari produksi komoditi kacang hijau tahun 2011 yang ditargetkan 1.298 ton dengan realisasi 1.506 ton atau 116,02%, menunjukkan komoditi ini dapat mencapai melebihi target produksi yang ditetapkan, meskipun nilai jual hanya berkisar antara Rp.8,000,- s/d Rp.10,000,- per Kg dan masih dianggap tidak ekonomis dan kurang diminati petani.

Apabila dilihat tingkat pencapaian dari produktivitas tanaman pangan, rata-rata realisasi mencapai di atas 95%. Untuk komoditi Padi dari target 45.91 Ku/Ha realisasi 46.57 Ku/Ha dengan tingkat capaian 101,44%, Jagung dari target 37.18 Ku/Ha dengan realisasi 40.35 Ku/Ha dengan tingkat capaian 108,53%, Ubi Jalar dari target 100.75 Ku/Ha dengan realisasi 104.16 Ku/Ha dengan tingkat capaian 103,38%, dan Ubi Kayu dengan target 127.50 Ku/Ha dan realisasi 127.66 Ku/Ha dengan tingkat capaian 100,13%, menunjukkan tingkat produktivitas cukup baik atau melebihi target yang ditetapkan, sedangkan tingkat produktivitas komoditi kedelai dari target 14,34 Ku/Ha dapat direalisasikan 14,14 Ku/Ha dengan tingkat capaian 98,61%, kacang tanah dari target 12,61 Ku/Ha dapat direalisasikan 12,34 Ku/Ha atau 97,86%, dan kacang hijau dari target 10,55 Ku/Ha direalisasikan 10,36 Ku/Ha atau 98,20%, walaupun belum sesuai dengan target yang ditetapkan, tetapi merupakan peningkatan hasil produksi yang diperoleh per hektar tanam dalam satu kali penanaman. Tingkat produktivitas

yang semakin baik diperoleh sejalan dengan pengembangan dalam penggunaan benih unggul bermutu, persediaan air yang cukup serta penggunaan pupuk dan pestisida diluar sarana produksi lainnya.

Untuk mendukung peningkatan produksi perkebunan pada tahun 2011 telah dilakukan beberapa kegiatan melalui pembangunan, penyaluran bibit, pemeliharaan, rehabilitasi dan pengembangan perkebunan rakyat meliputi :

1. Pembangunan dan Penanaman Kelapa Sawit seluas 8.200 Ha yang tersebar pada 13 Kabupaten/Kota terdiri dari kabupaten Aceh Timur seluas 700 Ha, Kabupaten Aceh Utara seluas 900 Ha, Kabupaten Bireuen seluas 700 Ha, Kabupaten Aceh Jaya seluas 500 Ha, Kabupaten Aceh Selatan seluas 800 Ha, Kabupaten Aceh Singkil seluas 800 Ha, Kota Subulussalam seluas 400 Ha, Kabupaten Aceh Barat Daya seluas 1.200 Ha, Kabupaten Aceh Besar seluas 250 Ha, Kabupaten Bener Meriah seluas 700 Ha, Kabupaten Pidie Jaya seluas 350 Ha, Kabupaten Nagan Raya seluas 500 Ha dan Kabupaten Simeuleu seluas 400 Ha.

Selain pembangunan dan penanaman, untuk pengembangan dan pemeliharaan kebun sawit, telah dilakukan rehabilitasi dan pengembangan tanaman perkebunan kelapa sawit seluas 100 Ha dan penyaluran bibit kelapa sawit kepada kelompok tani pada beberapa kabupaten serta pembangunan kebun benih kelapa sawit bermutu dan bersertifikat sebanyak 77.500 butir di kabupaten Aceh Timur.

2. Untuk pengembangan kebun karet rakyat telah dikembangkan seluas 1.900 Ha yang tersebar pada 4 kabupaten yaitu kabupaten Aceh Barat seluas 1.200 Ha, kabupaten Aceh Utara seluas 150 Ha, kabupaten Aceh Tamiang seluas 200 Ha dan kabupaten Aceh Jaya seluas 350 Ha. Sedangkan untuk pemeliharaan kebun karet

- seluas 100 Ha diarahkan pada kabupaten Aceh Utara, kabupaten Pidie Jaya, kabupaten Aceh Tamiang dan kabupaten Gayo Lues.
3. Pembangunan areal perkebunan dan pengembangan kebun kakao rakyat dilaksanakan melalui penyediaan bibit kakao dan pembangunan jalan usaha tani rakyat. Untuk tahun 2011 telah disediakan dan disalurkan sebanyak 950.000 batang bibit kakao yaitu sebanyak 200.000 batang dan pembangunan jalan usaha tani rakyat sepanjang 10 Km di kabupaten Pidie Jaya, sebanyak 750.000 batang bibit kakao untuk pengembangan areal perkebunan pada kabupaten Pidie, Bireuen, Aceh Besar, Gayo Lues, Aceh Selatan dan Kota Subulussalam, serta pengadaan kecambah kakao untuk kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 4.200.000 biji. Untuk meningkatkan mutu dan daya saing komoditi unggulan jenis tanaman kakao, juga dilaksanakan pembangunan kebun benih bermutu dan bersertifikat seluas 2 Ha di kabupaten Bireuen.
 4. Jenis tanaman perkebunan lainnya yang dikembangkan adalah tanaman kopi dan tanaman pala. Pada tahun 2011, sesuai dengan hak indikasi geografis telah dikembangkan seluas 150 Ha tanaman kopi di kabupaten Aceh Tengah melalui program rehabilitasi dan pengembangan areal perkebunan, dan jenis tanaman pala melalui pembangunan kebun benih bermutu dan bersertifikat sebanyak 200.000 benih di kabupaten Aceh Selatan.

Untuk mendukung peningkatan produksi peternakan pada tahun 2011 telah dilakukan beberapa kegiatan melalui Pembibitan dan Perawatan Ternak, Pendistribusian Bibit Ternak, Pengembangan Agribisnis Peternakan, Pengembangan Kawasan Ayam Ras Petelur, Pembangunan Kebun Rumput, Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan Padang Penggembalaan, Pembangunan Kawasan Peternakan Terpadu, dan Pengembangan Inseminasi Buatan, yang meliputi :

1. Pengadaan bibit sapi, kerbau, kuda, kambing, ayam dan itik, obat-obatan, pullet, feed suplemen, vaksin, pakan, konsentrat, peralatan dan perlengkapan peternakan sebanyak 63 paket.
2. Pembangunan kandang, gudang, mess, saung petani, Pos Inseminasi Buatan dan sarana pelengkap lainnya sebanyak 26 unit di le Mirah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Pelepasan rumpun Sapi Aceh sebagai plasma nutfah nasional di le Mirah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Pembangunan ruang pertemuan petani peternak sebanyak 1 unit.
5. Pembangunan Kebun Rumput, Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan Padang Penggembalaan telah dilaksanakan seluas 31 ha di Kabupaten Aceh Jaya.
6. Pengadaan straw, N₂ cair, hormon reproduksi, peralatan Inseminasi Buatan, PKB dan ATR sebanyak 10 paket.

Dalam rangka meningkatkan hasil produksi perikanan, pemerintah Aceh telah melakukan berbagai strategi, yang meliputi :

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan usaha perikanan melalui pengembangan dan pembinaan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir yang mandiri sebanyak 10 lembaga yang berada di Kota Sabang dan Kabupaten Simeulue. Jenis usaha yang dibina adalah tidak merusak lingkungan dan tergolong miskin, sehingga mampu meningkatkan jumlah lembaga ekonomi masyarakat pesisir yang mandiri.
2. Peningkatan peran masyarakat dalam pengamanan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pembinaan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang terdiri dari masyarakat nelayan dan para pemerhati lingkungan perairan, mengingat masyarakat nelayan dan pemerhati lingkungan sebagai masyarakat yang langsung bersentuhan dengan perairan. Sehingga diharapkan ada peningkatan wilayah yang bebas dari illegal fishing. Pembinaan

dilakukan di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yaitu Aceh Utara, Pidie Jaya, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tenggara, Gayo Lues dan Bener Meriah.

3. Peningkatan nilai produksi perikanan budidaya melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya, antara lain agroinput dengan jumlah 762.190 ekor benih, pengadaan Keramba Jaring Ikan (KJA), pembangunan dan rehab kolam/tambak dengan luas 18.200 m².
4. Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan prasarana dan sarana yang menunjang perikanan tangkap seperti pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), pemberian rumpon, pancing dan alat pendukung penangkapan lainnya.
5. Peningkatan kualitas penyuluh perikanan dilakukan melalui sertifikasi SDM pembudidaya ikan yang diikuti peserta sebanyak 83 orang. Selain itu juga dilakukan pembinaan dan pengembangan penyuluh perikanan di Kabupaten Aceh Tenggara dengan jumlah peserta 100 orang.
6. Peningkatan ragam produk olahan perikanan dilakukan melalui pembinaan kepada kelompok usaha yang bergerak dibidang pengolahan hasil perikanan dan meningkatkan SDM dalam bentuk pelatihan serta meningkatkan sarana dan prasarana olahan, pertemuan para pengusaha perikanan dan temu Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), peningkatan sarana dan prasarana Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat Daya dan Kota Subulussalam. Selain itu juga dilakukan pemberian cool box secara cuma-cuma kepada 800 orang dengan jumlah 806 unit sehingga produk olahan yang dihasilkan dapat ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jenis olahan yang dikembangkan pada tahun 2011 adalah nugget, bills cryspy, abon, dendeng, ikan kayu chip, pakung cryspy dan bakso ikan.

Berdasarkan analisis data Badan Pusat Statistik Aceh, secara umum peningkatan pertumbuhan perekonomian Aceh didukung dengan peranan sektor pertanian sebagai penyedia kebutuhan pangan pokok, pembentuk devisa (melalui ekspor) dan penampung tenaga kerja khususnya di pedesaan. Kebijakan sektor pertanian lebih menekankan pada ekonomi kerakyatan yang secara langsung melibatkan petani sebagai tulang punggung sektor pertanian. Peningkatan kesejahteraan petani mencerminkan Nilai Tukar Petani (NTP) yang semakin meningkat. Pada Februari 2012 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Aceh tercatat sebesar 105,08% naik sebesar 0,07% dibandingkan bulan Januari 2011 sebesar 105,01%. Sedangkan NTP menurut subsektor tercatat, Subsektor Tanaman Pangan (NTP-P) sebesar 112,27%; Subsektor Hortikultura (NTP-H) sebesar 101,82%; Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-Pr) sebesar 112,66%; Subsektor Peternakan (NTP-Pt) sebesar 99,52% dan Subsektor Perikanan (NTP-Pi) sebesar 101,04%.

Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Aceh cukup berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan petani karena dibandingkan dengan NTP Nasional pada periode yang sama justru mengalami penurunan sebesar 0,63% yaitu dari 105,73% pada bulan Januari 2011 menjadi 105,10% pada bulan Februari 2012.

Indikator kinerja jumlah investor dalam dan luar negeri sebanyak 76 Perusahaan dan realisasi 75 perusahaan dengan tingkat capaian 98,68%. Dilihat dari perkembangan investasi Aceh sejak 2007 hingga 2011 menunjukkan peningkatan semakin pesat, hal ini dibuktikan dengan bertambah banyak jumlah perusahaan yang telah mendapat persetujuan penanaman modal atau izin prinsip. Menurut data perkembangan investasi, sektor pertambangan dan perkebunan merupakan primadona investor dalam menanamkan modal di Aceh, jumlah Penanam Modal Dalam Negeri atau PMDN hingga 2011

mencapai 75 perusahaan dengan jumlah investasi lebih dari Rp.4 triliun, sedangkan Penanam Modal Asing atau PMA berjumlah 93 perusahaan dengan total investasi lebih dari \$US 2 miliar dolar.

Untuk terus meningkatkan Investasi dan penanaman modal di Aceh, telah dilakukan berbagai strategi antara lain melalui promosi potensi unggulan dengan keikutsertaan pada event expo dan pameran baik dalam dan luar negeri, seperti kegiatan Aceh Summit for Business Forum, pameran Jakarta Fair (PRJ), Penang Fair dan expo serta penggandaan leaflet, baliho potensi daerah, dan Misi Investasi ke Luar Negeri.

Kebijakan lain yang telah ditempuh untuk mempermudah dan memberi jaminan kepada investor yang melakukan penanaman modal di Aceh, telah ditetapkan Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2009 tentang Penanaman Modal, Peraturan Gubernur Aceh tentang Insentif bagi investor yang akan melakukan investasi di Aceh serta mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2010 tentang kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di luar negeri, disamping menerapkan sistem pelayanan perizinan terpadu dalam rangka memberikan kepastian memperoleh izin bagi investor yang akan melakukan investasi di Aceh.

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan sarana/ prasarana permukiman	Panjang jalan provinsi dalam kondisi baik	161,14 Km	159,80 Km	99,17
		Panjang jembatan dalam kondisi baik	2.072,07 Mtr	2.061,50 Mtr	99,49
		Panjang jaringan air bersih	88.935 Mtr	84.524 Mtr	95,04
		Panjang Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong	81.035 Mtr	81.035 Mtr	100,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Panjang Pembangunan jalan pedesaan	70 Km	69,75 Km	99,64
		Jumlah pembangunan rumah sehat sederhana siap huni bagi masyarakat korban bencana dan dhuafa	811 Unit	806 Unit	99,38

Pencapaian indikator kinerja panjang jalan provinsi dalam kondisi baik, yang ditargetkan pada tahun 2011 sepanjang 161,14 Km, dan dapat direalisasi sepanjang 159,80 Km atau sebesar 99,17%. Tingkat capaian tersebut menunjukkan kualitas jalan sebagai sarana transportasi semakin meningkat dan dapat membuka aksesibilitas antar wilayah dalam rangka memperlancar arus barang dan jasa.

Untuk mendukung pencapaian indikator ini telah dilaksanakan peningkatan kualitas jalan pada Kabupaten Aceh Besar sepanjang 9,73 Km, Kabupaten Pidie sepanjang 3,08 Km, Kabupaten Pidie Jaya sepanjang 2,69 Km, Kabupaten Bireun sepanjang 7,36 Km, Kabupaten Aceh Utara sepanjang 4,74 Km, Kabupaten Aceh Timur sepanjang 10,01 Km, Kabupaten Aceh Tamiang sepanjang 2,11 Km, Kabupaten Aceh Jaya sepanjang 3,46 Km, Kabupaten Nagan Raya sepanjang 3,68 Km, Kabupaten Aceh Barat sepanjang 2,00 Km, Kabupaten Aceh Barat Daya sepanjang 1,62 Km, Kabupaten Aceh Selatan sepanjang 3,00 Km, Kabupaten Subulussalam & Singkil sepanjang 1,95 Km, Kabupaten Siemelue sepanjang 11,32 Km, Kabupaten Bener Meriah sepanjang 1,48 Km, Kabupaten Gayo Lues sepanjang 13,57Km, dan jalan provinsi lintas Kabupaten/Kota sepanjang 78,00 Km.

Untuk indikator kinerja panjang jembatan dalam kondisi baik, realisasi dapat dicapai sepanjang 2.061,50 meter dari target yang telah ditetapkan sepanjang 2.072,07 meter dengan tingkat capaian sebesar 99,49%. Tingkat capaian relatif baik dalam realisasi indikator ini, karena

setiap pelaksanaan pembangunan jembatan disinergikan dengan perencanaan dan pembangunan jalan.

Pencapaian indikator ini telah dilaksanakan pembangunan jembatan secara sinergi pada Kabupaten Aceh Besar sepanjang 410 meter, Kabupaten Pidie sepanjang 343 meter, Kabupaten Bireuen sepanjang 113 meter, Kabupaten Aceh Utara sepanjang 20 meter, Kota Lhokseumawe sepanjang 12 meter, Kabupaten Aceh Tamiang sepanjang 673 meter, Kabupaten Aceh Jaya sepanjang 20 meter, Kabupaten Aceh Barat sepanjang 153 meter, Kabupaten Subulussalam & Singkil 5 meter, Kabupaten Simeulue sepanjang 211 meter, dan Kabupaten Gayo Lues sepanjang 91 meter serta jembatan Propinsi lintas Kabupaten/Kota sepanjang 10,50 meter.

Terhadap indikator kinerja panjang jaringan air bersih, pada tahun 2011 ditargetkan sepanjang 88.935 meter, dapat direalisasikan sepanjang 84.524 meter dengan tingkat capaian sebesar 95,04%. Pencapaian indikator kinerja ini dapat dikategorikan cukup baik sebagai wujud dalam memenuhi kebutuhan air bersih pada permukiman masyarakat yang dilaksanakan melalui pengembangan sistim distribusi air minum, meliputi pembangunan jaringan pipa, sumur bor, reservoir dan pengadaan watermeter yang tersebar di Kabupaten/Kota yaitu Kota Banda Aceh sepanjang 290 meter, Kabupaten Bireuen sepanjang 2.260 meter, Kabupaten Aceh Utara sepanjang 5.099 meter, Kota Langsa sepanjang 4.724 meter, Kabupaten Aceh Timur sepanjang 10.317 meter, Kabupaten Aceh Barat sepanjang 140 meter, Kabupaten Aceh Selatan sepanjang 13.544 meter, Kabupaten Aceh Singkil sepanjang 3.838 meter, Kabupaten Simeulue sepanjang 10.026 meter, Kabupaten Subulussalam sepanjang 7.412 meter, Kabupaten Aceh Tengah sepanjang 10.760 meter dan Kabupaten Aceh Tenggara sepanjang 1.127 meter. Sedangkan pada Kabupaten Pidie, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Barat Daya telah dibangun

jaringan air bersih dalam bentuk paket dengan total sepanjang 14.987 meter.

Dalam rangka memperbaiki lingkungan dan permukiman yang sehat, pemerintah Aceh menargetkan pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong sepanjang 81.035 meter. Dalam pelaksanaannya mampu direalisasikan seluruhnya atau tingkat capaian sebesar 100% yang tersebar pada 17 Kabupaten/Kota masing-masing Kota Banda Aceh sepanjang 18.232 meter, Kabupaten Aceh Besar sepanjang 4.705 meter, Kota Sabang sepanjang 3.630 meter, Kabupaten Pidie sepanjang 1.985 meter, Kabupaten Bireuen sepanjang 1.127 meter, Kabupaten Aceh Utara sepanjang 1.180 meter, Kota Lhokseumawe sepanjang 1.671 meter, Kota Langsa sepanjang 1.950 meter, Kabupaten Aceh Timur sepanjang 13.204 meter, Kabupaten Aceh Tamiang sepanjang 12.000 meter, Kabupaten Aceh Tengah sepanjang 3.279 meter, Kabupaten Aceh Jaya sepanjang 12.000 meter, Kabupaten Aceh Barat sepanjang 857 meter, Kabupaten Aceh Barat Daya sepanjang 1.944 meter, Kabupaten Nagan Raya sepanjang 1.241 meter dan Kabupaten Gayo Lues sepanjang 2.030 meter.

Pencapaian Terhadap indikator panjang pembangunan jalan pedesaan yang ditargetkan 70 km, dapat direalisasikan 69,75 km, atau 99,64%. Sasaran utama indikator ini untuk perbaikan lingkungan dan permukiman guna meningkatkan kelancaran akses masyarakat pedesaan dengan meningkatkan kualitas jalan desa dan jembatan pada 18 Kabupaten/Kota sepanjang 69,63 km jalan desa dan jembatan sepanjang 0,12 km atau 120 meter.

Untuk memenuhi kebutuhan rumah sehat sederhana siap huni bagi masyarakat konflik dan dhuafa, pada tahun 2011 pemerintah Aceh menargetkan pembangunan sebanyak 811 unit, dalam pelaksanaannya

telah direalisasikan sebanyak 806 unit dengan tingkat capaian sebesar 99,38%, tersebar pada 21 Kabupaten/Kota terdiri dari Kota Banda Aceh sebanyak 10 Unit, Kabupaten Aceh Besar sebanyak 11 Unit, Kabupaten Pidie sebanyak 34 Unit, Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 3 Unit, Kabupaten Bireuen sebanyak 28 Unit, Kota Lhokseumawe sebanyak 20 Unit, Kabupaten Aceh Utara sebanyak 90 Unit, Kabupaten Aceh Timur sebanyak 75 Unit, Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 66 Unit, Kota Langsa sebanyak 39 Unit, Kabupaten Aceh Jaya sebanyak 14 Unit, Kabupaten Aceh Barat sebanyak 15 Unit, Kabupaten Nagan Raya sebanyak 75 Unit, Kabupaten Abdyas sebanyak 115 Unit, Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 18 Unit, Kota Subulussalam sebanyak 36 Unit, Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 33 Unit, Kabupaten Bener Meriah sebanyak 36 Unit, Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 24 Unit, Kabupaten Gayo Lues sebanyak 26 Unit, dan Kabupaten Tenggara sebanyak 38 Unit.

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
3.	Meningkatnya ketepatan bangunan irigasi, pengaman pantai dan normalisasi sungai	Luas cakupan irigasi dalam kondisi baik	41.887 Ha	41.887 Ha	100,00
		Panjang pembangunan pengaman pantai	5.598,65 M	5.598,65 M	100,00
		Panjang pengaman tebing sungai	35.524,80 M	35.524,80 M	100,00

Terhadap indikator kinerja luas cakupan irigasi dalam kondisi baik, dalam tahun 2011 yang ditargetkan seluas 41.887 hektar mampu direalisasikan 100%. Hal ini menunjukkan luas cakupan irigasi dalam kondisi baik semakin bertambah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga cakupan lahan pertanian terairi dapat dijangkau lebih luas dan mempengaruhi tingkat produksi pertanian. Tingkat pencapaian kinerja ini didukung dengan pembangunan jaringan irigasi pada 12 kabupaten yaitu kabupaten Pidie sebanyak 5 paket, kabupaten Pidie Jaya sebanyak 2 paket, kabupaten Bireuen sebanyak 10 paket,

kabupaten Aceh Utara sebanyak 2 paket, kabupaten Aceh Timur sebanyak 1 paket, kabupaten Bener Meriah sebanyak 3 paket, kabupaten Aceh Tengah sebanyak 3 paket, kabupaten Gayo Lues sebanyak 14 paket, kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 14 paket, kabupaten Nagan Raya sebanyak 2 paket, Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 6 paket dan kabupaten Aceh Selatan sebanyak 1 paket, serta pembangunan 7 unit bendung, pembangunan intake, saluran induk, saluran sekunder, saluran pembuang dan bangunan pelengkap lainnya. Untuk mengoptimalkan fungsi jaringan Irigasi yang sudah dibangun, telah dilakukan perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi pada 20 kabupaten/kota yaitu kabupaten Aceh Besar sebanyak 38 paket, kabupaten Pidie sebanyak 51 paket, kabupaten Pidie Jaya sebanyak 17 paket, kabupaten Bireuen sebanyak 45 paket, kabupaten Aceh Utara sebanyak 37 paket, kabupaten Aceh Timur sebanyak 24 paket, Kota Langsa sebanyak 2 paket, kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 12 paket, kabupaten Bener Meriah sebanyak 15 paket, kabupaten Aceh Tengah sebanyak 6 paket, kabupaten Gayo Lues sebanyak 11 paket, kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 6 paket, kabupaten Aceh Jaya sebanyak 8 paket, kabupaten Aceh Barat sebanyak 12 paket, kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 19 paket, kabupaten Nagan Raya sebanyak 7 paket, kabupaten Aceh Selatan sebanyak 20 paket, kota Subulussalam sebanyak 5 paket, kabupaten Aceh Singkil sebanyak 1 paket dan kabupaten Simeulue sebanyak 1 paket.

Dalam upaya mengantisipasi dan menangani abrasi, erosi dan banjir pasang (rob), pada tahun 2011 pemerintah Aceh telah menargetkan pembangunan pengaman pantai sepanjang 5.598,65 meter, dalam pelaksanaannya dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan atau 100%. Untuk mendukung tingkat capaian indikator ini dalam melindungi areal pemukiman dan pertanian dari ancaman bahaya abrasi dan gelombang pasang, agar masyarakat

merasa aman dan terhindar dari bencana telah dilaksanakan pembangunan tanggul pengaman pantai, pengerukan dan pembangunan jetty pada 15 (lima belas) kabupaten/kota yang terdiri dari 1 paket di kota Banda Aceh, 4 paket di kabupaten Aceh Besar, 5 paket di kabupaten Pidie, 2 paket di kabupaten Pidie Jaya, 4 paket di kabupaten Bireuen, 2 paket di Kota Lhokseumawe, 3 paket di kabupaten Aceh Timur, 1 paket di Kota Langsa, 2 paket di kabupaten Aceh Jaya, 2 paket di kabupaten Aceh Barat, 2 paket di kabupaten Nagan Raya, 2 paket di kabupaten Aceh Barat Daya, 4 paket di kabupaten Aceh Selatan, 3 paket di kabupaten Aceh Singkil dan 2 paket di kabupaten Simeulue.

Sedangkan terhadap indikator kinerja panjang pengaman tebing sungai ditargetkan sepanjang 35.534,80 meter dan terealisasi sesuai dengan target 100%. Kegiatan ini tetap dilaksanakan dalam upaya pengendalian banjir guna melindungi areal pemukiman dan pertanian dari ancaman bahaya banjir dan mencegah tergenangnya rumah penduduk, lahan produktif dan kawasan perekonomian sosial masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman dan terhindar dari bencana. Pada tahun 2011 pemerintah Aceh telah melaksanakan pembangunan tanggul/bangunan penguatan tebing sungai, pelurusan dan normalisasi sungai di 18 (delapan belas) kabupaten/kota melalui kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai pada kota Banda Aceh 1 paket, kabupaten Aceh Besar 3 paket, kabupaten Pidie 11 paket, kabupaten Pidie Jaya 2 paket, kabupaten Bireuen 2 paket, kabupaten Aceh Utara 12 paket, kabupaten Aceh Timur 2 paket, Kota Langsa 1 paket, kabupaten Aceh Tamiang 3 paket, kabupaten Aceh Tengah 1 paket, kabupaten Gayo Lues 3 paket, kabupaten Aceh Tenggara 8 paket, kabupaten Aceh Jaya 1 paket, kabupaten Aceh Barat 5 paket, kabupaten Nagan Raya 2 paket,

kabupaten Aceh Barat Daya 3 paket, kabupaten Aceh Selatan 2 paket dan kabupaten Simeulue 1 paket.

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
4.	Meningkatnya pelayanan jaringan transportasi, komunikasi, informasi dan telematika	Persentase ketersediaan fasilitas perhubungan komunikasi dan informatika yang memenuhi SPM	100 %	87 %	87,00
		Jumlah prasarana perhubungan darat	24 unit	24 Unit	100,00
		Jumlah prasarana perhubungan laut	7 Unit	7 Unit	100,00
		Jumlah prasarana perhubungan udara	8 Unit	8 Unit	100,00
		Jumlah aplikasi e-gov pemda	7 aplikasi	7 aplikasi	100,00

Tingkat capaian indikator kinerja persentase ketersediaan fasilitas perhubungan komunikasi dan informatika yang memenuhi SPM ditargetkan sebesar 100% dan mampu direalisasikan sebesar 87% atau dengan tingkat capaian sebesar 87%. Kekurangan atas tingkat capaian indikator ini akan terpenuhi secara bertahap sesuai dengan nilai target SPM yang harus dicapai sebesar 100% pada tahun 2014 melalui beberapa kebijakan dalam upaya memenuhi target, antara lain pembangunan sarana dan prasarana transportasi, penyediaan fasilitas perhubungan, meningkatkan dan memperluas jaringan perhubungan, komunikasi, informasi dan telematika.

Tingkat capaian Indikator jumlah prasarana perhubungan darat, yang ditargetkan sebanyak 24 unit, dapat direalisasikan sebanyak 24 unit atau dengan tingkat capaian sebesar 100%. Capaian kinerja ini meliputi beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 antara lain perencanaan dan pembangunan terminal angkutan penumpang tipe B dan tipe C yang tersebar di beberapa

kabupaten/kota, pembangunan halte, penyediaan fasilitas rambu lalu lintas, marka jalan, guardrail, delineator dan pembangunan gedung pengujian kendaraan bermotor serta gedung terminal.

Dari target yang ditetapkan pada indikator kinerja jumlah prasarana perhubungan laut sebanyak 7 unit, dapat direalisasikan sebanyak 7 unit atau 100%. Capaian kinerja ini meliputi beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 antar lain perencanaan/pembangunan mushalla dermaga Kuala Langsa, rehab dermaga tambat Desa Kilangan dan pembangunan dermaga tambat Trans Kota Simbolin Kabupaten Aceh Singkil, perencanaan dan pembangunan dermaga, halte di Kabupaten Aceh Singkil, pembangunan pelabuhan rakyat Laweung Kabupaten Pidie, General Over haul KM Pulo Rondo, pembangunan kapal kayu penumpang dan barang Meulingge-Pulo Aceh.

Dari target yang ditetapkan pada indikator kinerja jumlah prasarana perhubungan udara sebanyak 8 unit, dapat direalisasikan sebanyak 8 unit atau 100%. Capaian kinerja ini meliputi beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 meliputi perizinan SIUAU dan AOC141 serta operasional, pembelian suku cadang pesawat C-172 dan Ground Support Equipment, pembelian 2 unit pesawat C-172, perencanaan prasarana dan fasilitas bandara Kabupaten Aceh Singkil, pembangunan tower navigasi bandara Alas Leuser, pengadaan peralatan NDB (Non Directional Beacons) bandara Kabupaten Aceh Utara, pembangunan tahap IV gedung VIP bandar udara Kuala Batu Kabupaten Aceh Barat Daya dan bandar udara Syech Hamzah Fanshuri Aceh Singkil.

Jumlah aplikasi e-gov pemda yang ditargetkan sebanyak 7 paket, dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan atau dengan tingkat capaian sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini dilaksanakan

melalui kegiatan pengembangan sistem email berbasis LDAP (*mail.acehprov.go.id*), pembangunan aplikasi ticketing SIM, sarana publik perhubungan komintel Aceh berbasis GIS, pembangunan aplikasi ticketing pengaduan jaringan, pengembangan aplikasi SIMDA, pembangunan aplikasi kearsipan secara digital dan pembangunan aplikasi monitoring dan evaluasi serta pembangunan website bank data pada dishubkomintel Aceh. Dalam rangka peningkatan pelayanan dibidang komunikasi, informasi dan telematika, pemerintah Aceh juga menyediakan beberapa titik hotspot yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat pada beberapa lokasi strategis dalam wilayah Aceh.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
5.	Meningkatnya pengembangan pertambangan dan energi yang berkelanjutan	Jumlah pengembangan energi alternatif/terbarukan	4 Lokasi	3 Lokasi	75,00
		Jumlah pembangkit listrik bagi masyarakat desa yang tidak terjangkau PLN	8 Unit	8 Unit	100,00
		Jumlah pengeboran air tanah pada daerah krisis air bersih	22 Lokasi	22 Lokasi	100,00

Dari 4 (empat) lokasi yang ditargetkan dalam indikator kinerja jumlah pengembangan energi alternatif/terbarukan, Pemerintah Aceh hanya dapat merealisasikan 3 (tiga) lokasi pengembangan energi alternatif, atau dengan tingkat capaian sebesar 75%. Keempat lokasi tersebut yaitu PLTU Batu Bara di Kabupaten Nagan Raya dengan kapasitas 2x100MW, PLTP Seulawah di Kabupaten Aceh Besar dengan total kapasitas 2x20MW, PLTA Peusangan I dan II di Kabupaten Aceh Tengah dengan total kapasitas 2x43MW yang dibiayai dari Loan JBIC (*Japan Bank International Company*), dan PLTA Lawe Mamas di Kabupaten Aceh Tenggara dengan total kapasitas 3x30MW

yang direncanakan beroperasi pada tahun 2015 dan saat ini masih dalam pre-fs dan MoU. Terhadap pengembangan PLTA di Lawe Mamas Kabupaten Aceh Tenggara belum dapat dilaksanakan karena termasuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

Pemerintah Aceh telah berupaya secara optimal memanfaatkan sumber daya energi alternatif yang bersih dan ramah lingkungan. Hal ini tercermin pada tahun 2011 jumlah penyediaan pembangkit listrik bagi masyarakat gampong (desa) yang tidak terjangkau PLN ditargetkan sebanyak 8 unit atau dengan capaian 100%, terdiri dari 5 unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang terletak di Kute Lengat Kabupaten Gayo Lues, Weh Nuso Kecamatan Putri Betong Kabupaten Gayo Lues, Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur, Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara dan Kampong Sembuang Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur. Sedangkan 3 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sudah dilakukan pembangunan pada Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Gayo Lues. Dengan demikian, penyediaan pembangkit listrik bagi masyarakat desa yang tidak terjangkau PLN terutama pada daerah terpencil, terisolir, perbatasan dan kepulauan secara bertahap akan terpenuhi.

Untuk mengatasi kekurangan kebutuhan air bersih bagi masyarakat pada daerah krisis air bersih, pemerintah Aceh telah melakukan pengeboran air tanah yang ditargetkan pada 22 lokasi dengan realisasi sebesar 100%. Kegiatan pengeboran dilakukan pada 6 (enam) Kabupaten, yaitu Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Tamiang, guna memenuhi kebutuhan sumber air bersih bagi kehidupan masyarakat.

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
6.	Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Luas areal yang terlindungi	214 Ha	62 Ha	28,97
		Persentase kendaraan bermotor yang lulus uji emisi	100 %	70,26 %	70,26
		Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah mempunyai Ruang Terbuka Hijau	16 Kab/Kota	3 Kab/Kota	18,75
		Persentase penurunan pencemaran kadar BOD air sungai	15 %	10 %	66,67
		Jumlah perusahaan yang sudah mengelola B3	14 Prsh	16 Prsh	114,29

Berdasarkan tabel di atas, tingkat capaian indikator kinerja luas areal yang terlindungi tahun 2011 ditargetkan 214 Ha dapat direalisasikan sebesar 62 Ha atau dengan tingkat capaian 28,97%. Belum optimalnya tingkat capaian indikator ini disebabkan beberapa kendala, antara lain sulitnya mendapat lokasi, kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyediaan lahan, dan konflik interest pengelolaan lahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya dengan melakukan koordinasi dan pendekatan persuasif baik dengan instansi terkait maupun dengan masyarakat, serta memformulasikan suatu kebijakan dalam pengelolaan kawasan ekosistem Leuser.

Tingkat capaian indikator kinerja persentase kendaraan bermotor yang lulus uji emisi ditargetkan sebesar 100% hanya mampu direalisasikan sebesar 70,26% dengan tingkat capaian sebesar 70,26%. Pencapaian target ini belum dapat terealisasi secara maksimal sesuai dengan target yang ditetapkan, antara lain disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana uji emisi dan ketersediaan teknisi.

Pemerintah Aceh secara bertahap terus berupaya meningkatkan kualitas SDM teknis uji emisi dengan memberikan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi fasilitas sarana pengujian emisi sesuai dengan kebutuhan.

Terhadap capaian indikator kinerja jumlah kabupaten/kota yang sudah mempunyai Ruang Terbuka Hijau ditargetkan sebanyak 16 kabupaten/kota, telah direalisasikan sebanyak 3 kabupaten/kota dengan tingkat capaian sebesar 18,75%. Masih rendah tingkat capaian ini, disebabkan ada beberapa kabupaten/kota yang telah ditargetkan untuk areal Ruang Terbuka Hijau masih dalam proses penyediaan lahan sesuai yang direncanakan dalam rencana tata kota. Namun demikian dalam rangka mewujudkan *Aceh Clean and Green* pemerintah Aceh dalam memfasilitasi penyusunan RTRW dan rencana tata kota akan memberikan perhatian khusus terhadap ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di setiap kabupaten/kota.

Terhadap indikator kinerja persentase penurunan pencemaran kadar BOD air sungai direncanakan sebesar 15% dan terealisasi sebesar 10% dengan tingkat capaian sebesar 66,67%. Beberapa faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya pencapaian target indikator ini, antara lain keterbatasan peran dan komitmen perusahaan serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Namun untuk meminimalisir tingkat pencemaran air sungai, pemerintah Aceh tetap memprioritaskan untuk penurunan tingkat pencemaran air sungai sesuai dengan standar kadar yang dapat ditolerir melalui koordinasi dengan instansi terkait, pembinaan, pengawasan serta penyuluhan kepada pemrakarsa, pelaku usaha dan masyarakat di sekitar daerah aliran sungai.

Salah satu keberhasilan pencapaian sasaran strategis menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilihat dari indikator kinerja jumlah perusahaan yang sudah mengelola limbah B3. Dari 14 perusahaan yang telah mengelola limbah B3, terealisasi sebanyak 16 Perusahaan dengan tingkat capaian sebesar 114,29%. Pencapaian yang optimal pada kinerja ini diperoleh dari intensitas dalam melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan/industri yang menghasilkan limbah B3 melalui pengendalian pencemaran lingkungan berdasarkan analisis dampak lingkungan.

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
7.	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan	Persentase peningkatan APK PAUD 4-6 Tahun	35%	36,72%	104,91
		Persentase peningkatan APM SD/ MI/ SDLB	96,50%	98,52%	102,09
		Persentase peningkatan APK SMP/ MTs/ SMPLB	98,50%	100,89%	102,43
		Persentase peningkatan APK SMA/ MA/ SMALB/SMK	92%	81,57%	88,66

Tingkat capaian indikator kinerja persentase peningkatan APK PAUD 4-6 tahun, mampu direalisasikan sebesar 36,72% dari target sebesar 35% atau 104,91%. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 9,84% dari APK PAUD tahun 2010 sebesar 26,88% yang mempunyai makna bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya PAUD terus meningkat, sebagai bukti lainnya ditandai dengan semakin banyak usulan dan permintaan masyarakat untuk mengembangkan lembaga pendidikan PAUD/TK dengan mengajukan proposal pembukaan lembaga PAUD/TK Non Formal.

Salah satu indikator peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendukung program ini tergambar dari kesediaan mereka menyediakan lahan untuk pembangunan TK baru di berbagai tempat.

Dilihat dari tingkat capaian terhadap indikator persentase peningkatan APM SD/MI/SDLB yang merupakan salah satu pendukung dalam pencapaian sasaran meningkatkan perluasan akses dan pemerataan pendidikan, dari target yang ditetapkan pada tahun 2011 sebesar 96,50% dapat direalisasikan sebesar 98,52% atau 102,09%. Peningkatan dalam pencapaian indikator ini diwujudkan melalui program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan penyebaran lembaga pendidikan dasar serta tenaga pengajar dalam jumlah yang cukup sampai ke daerah-daerah terpencil sehingga diharapkan tidak akan terjadi disparitas pendidikan.

Demikian juga persentase peningkatan APK SMP/MTs/SMPLB mengalami kenaikan dengan capaian sebesar 102,43% dari target yang ditetapkan sebesar 98,50% dan realisasi sebesar 100,89%. Optimalisasi dalam pencapaian kinerja ini dilakukan melalui beberapa strategi, antara lain dengan pembebasan biaya pendidikan pada tingkat menengah, mengarahkan dan mendorong partisipasi masyarakat serta dunia usaha terhadap pemerataan dan perluasan akses pendidikan.

Indikator kinerja persentase peningkatan APK SMA/MA/SMALB/SMK di Aceh tahun 2011 dapat direalisasikan sebesar 81,57% dari target sebesar 92% atau 88,66%. Belum optimalnya pencapaian indikator kinerja ini disebabkan antara lain masih terbatas penyediaan sarana dan prasarana pendidikan jenjang menengah dan kurangnya jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang berbasis keunggulan lokal, sehingga terbuka peluang yang berpotensi menimbulkan angka putus

sekolah anak usia 16-18 tahun, namun realisasi sebesar 81,57% telah menunjukkan peningkatan sebanding dengan APK tahun sebelumnya.

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
8.	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan	Rata-rata nilai UN SMP/MTs	7,36	7,65	103,94
		Rata-rata nilai UN SMA/MA	7,40	7,46	100,81
		Jumlah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tingkat SMP, SMA, dan SMK	22	28	127,27
		Persentase SMK berbasis keunggulan lokal	24 %	22 %	91,67

Berdasarkan tabel di atas, untuk melihat tingkat capaian sasaran peningkatan mutu dan daya saing pendidikan, dapat diukur melalui indikator kinerja Rata-rata nilai UN SMP/MTs, Rata-rata nilai UN SMA/MA, Jumlah Rintisan Sekolah bertaraf internasional (SMP, SMA, dan SMK) dan Jumlah SMK berbasis keunggulan lokal.

Terhadap indikator kinerja rata-rata nilai Ujian Nasional SMP/MTs, pada tahun 2011 ditargetkan dapat mencapai 7,36 dalam realisasi diperoleh 7,65 dengan tingkat capaian sebesar 103,94%. Pencapaian yang optimal terhadap peningkatan nilai UN dimaksud mencerminkan bahwa mutu dan daya saing pendidikan di Aceh semakin meningkat, bahkan apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional nilai UN 7,56, menunjukkan perolehan hasil nilai UN di Aceh lebih tinggi 0.09 dari nilai rata-rata secara nasional.

Sedangkan tingkat capaian pada indikator kinerja rata-rata nilai UN SMA/MA/SMK ditargetkan 7,40 dapat direalisasikan 7,46 dengan tingkat capaian sebesar 100,81%, atau lebih tinggi 0.59 dari rata-rata nasional nilai UN 6,87. Hal ini menunjukkan bahwa upaya dalam

meningkatkan mutu pendidikan dapat dikategorikan cukup berhasil, akan tetapi terhadap daya saing belum mampu berkompetisi secara global untuk menentukan Perguruan Tinggi yang bermutu, karena kurikulum pendidikan yang sangat berorientasi pada keilmuan, sehingga menyebabkan rendahnya keterampilan dan kecakapan hidup yang berakibat pada lemahnya daya saing lulusan serta kurangnya kepekaan dan tuntutan lapangan kerja.

Dalam hal indikator kinerja jumlah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tingkat SMP, SMA, dan SMK, yang ditargetkan sebanyak 22 sekolah dapat direalisasikan sebanyak 28 sekolah, atau dengan tingkat capaian sebesar 127,27%. Kebijakan yang dilakukan untuk pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), pada tahun 2011 telah dilaksanakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) sehingga terdapat 8 (delapan) SMPN yaitu SMPN 1 Bireuen, SMPN 6 Banda Aceh, SMPN 3 Langsa, SMPN 1 Lhokseumawe, SMPN 1 Takengon, SMPN 1 Banda Aceh, SMPN 1 Langsa, dan SMPN 2 Blangpidie, yang telah ditetapkan menjadi sekolah berstatus RSBI. Untuk jenjang sekolah menengah atas telah ditetapkan 8 (delapan) SMAN yaitu SMAN Modal Bangsa Kabupaten Aceh Besar, SMAN 2 Kota Banda Aceh, SMAN 4 Takengon, SMAN 4 Wira Bangsa Kabupaten Aceh Barat, SMA Sukma Bangsa Kabupaten Bireuen, SMA Lab School Banda Aceh, SMA 1 Kota Lhokseumawe, dan SMAN 1 Langsa. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Kejuruan ditetapkan 12 SMKN yang ditingkatkan menjadi RSBI yaitu SMKN 1 Takengon, SMKN 1 Bireuen, SMKN 1,2 dan 3 Banda Aceh, SMKN 2 Meulaboh, SMKN 1 Sabang, SMKN 1 dan 4 Lhokseumawe, SMKN 2 Langsa, SMKN 1 Kutacane, dan SMK PP Saree Kabupaten Aceh Besar.

Terhadap indikator kinerja persentase SMK berbasis keunggulan lokal, pada tahun 2011 ditargetkan sebesar 24% dapat direalisasikan

sebesar 22% atau dengan tingkat capaian sebesar 91,67%. Pencapaian kinerja ini berdasarkan dari jumlah SMK di Aceh sebanyak 141 unit, namun baru 31 unit SMK yang berbasis keunggulan lokal berdasarkan karakteristik dan potensi unggulan daerah yaitu SMK 1 Gandapura Kabupaten Bireuen, SMK 1 Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, SMK 1 Baktia Barat Kabupaten Aceh Utara, SMK 1 Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, SMK 1 dan 5 Banda Aceh, SMK 2 dan 3 Sigli Kabupaten Pidie, SMK 1 Bireuen Kabupaten Bireuen, SMK 2 Takengong Kabupaten Aceh Tengah, SMK 4 Lhokseumawe, SMK 1 Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, SMK 1 dan 2 Karangbaru Kabupaten Aceh Tamiang, SMK 4 dan 5 Langsa, SMK 1 Kandang Kabupaten Aceh Selatan, SMK 1 Rasian Kabupaten Aceh Selatan, SMK 1 Idi Kabupaten Aceh Timur, SMK 1 Peurelak Kabupaten Aceh Timur, SMK 1 Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara, SMK 1 Yasafa Kabupaten Aceh Singkil, SMK 1 Penanggalan Kota Subulussalam, SMK 1 Gayo Lues, SMK 2 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, SMK 1 Dharma Salihat Kabupaten Nagan Raya, SMK 1 Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, SMK 1 Sabang, SMK 1 Jeunib Kabupaten Bireuen, SMK 1 Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, dan SMK PP Saree Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
9.	Meningkatnya mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Tingkat pelayanan kesehatan	85 %	85 %	100,00
		Rasio Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	24 per 1000 LH	16,3 per 1000 LH	132,08
		Rasio Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	118 per 100.000 LH	119 per 100.000 LH	99,15
		Angka Usia harapan hidup	72 Tahun	71 Tahun	98,61

Dari rencana capaian yang telah ditetapkan terhadap indikator tingkat pelayanan kesehatan pada tahun 2011 sebesar 85%, dapat direalisasikan sesuai dengan target atau dengan tingkat capaian sebesar 100%. Pencapaian ini menunjukkan tingkat pelayanan kesehatan terhadap masyarakat sudah optimal, salah satu strategi yang menonjol dilakukan melalui Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Berdasarkan hasil survey oleh Lembaga Survey Lessat Com, menunjukkan program ini mendapat respon luar biasa dan minat yang cukup tinggi dari masyarakat Aceh untuk berobat dengan JKA hingga mencapai 95%. Survey ini dilaksanakan pada 4 (empat) rumah sakit pemerintah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Lhokseumawe, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, Rumah Sakit Umum Meuraxa Banda Aceh dan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin selaku rumah sakit rujukan dengan melibatkan sampel sebanyak 600 orang.

Untuk melihat tingkat capaian dari indikator kinerja Rasio Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup, yang ditargetkan 24 per 1000 kelahiran hidup dalam realisasi dapat dicapai menjadi 16,3 per 1000 kelahiran hidup atau sebesar 132,08%. Tingkat realisasi ini menunjukkan rasio angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dapat dikategorikan cukup baik atau tingkat kematian bayi dapat ditekan sebanyak 7,7 per 1000 kelahiran hidup dalam tahun 2011. Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini antara lain didukung faktor-faktor yang menyebabkan kematian bayi akibat asfiksia, berat badan lahir rendah, infeksi dan lainnya dapat ditangani dan dihindari dengan memberi pemahaman dan pengetahuan kepada ibu dalam menjaga kesehatan reproduksi melalui asupan gizi serta ketersediaan tenaga kesehatan terlatih dan mempunyai kompetensi.

Rasio angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup yang ditargetkan 118 per 100.000 kelahiran hidup dapat direalisasikan 119 per 100.000 kelahiran hidup atau 99,15%. Belum optimalnya tingkat capaian pada indikator ini antara lain disebabkan usia produktif ibu melahirkan, asupan gizi ibu yang belum seimbang dan cakupan ibu melahirkan yang ditangani oleh tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kompetensi kebidanan hanya 80% dan ketersediaan dokter spesialis obgyn/kandungan belum sebanding dengan standar WHO yaitu 1:100.000 penduduk, sedangkan di Aceh perbandingan tenaga dokter obgyn dan kebidanan masih berkisar 1:160.214 per penduduk.

Sedangkan tingkat capaian indikator kinerja angka usia harapan hidup yang ditargetkan menjadi 72 tahun, namun hanya mampu dicapai menjadi 71 tahun atau tingkat capaian 98,61%. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah Aceh untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat melalui program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia karena telah membawa dampak positif terhadap peningkatan usia harapan hidup. Faktor lain yang sangat mempengaruhi terhadap capaian ini adalah pola hidup masyarakat yang sehat dan sudah tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan. Dengan demikian usia harapan hidup penduduk Aceh sampai dengan tahun 2011 masih berada di atas angka rata-rata usia harapan hidup secara nasional yang ditetapkan 68 tahun.

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
10.	Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan syariat Islam	Penanganan pelanggaran syariat islam	150 Kasus	160 Kasus	106,67
		Jumlah penerimaan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS)	5.000.000.000,-	4.400.000.000,-	88,00

Sebagai daerah yang mempunyai kekhususan dalam pelaksanaan Syariat Islam, Pemerintah Aceh telah menetapkan indikator kinerja jumlah penanganan pelanggaran syariat Islam sebagai ukuran pencapaian sasaran meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Syariat Islam. Tingkat Capaian Kinerja indikator ini berhasil dicapai sebesar 106,67% dari target sebanyak 150 kasus yang direncanakan dapat ditangani, dalam pelaksanaannya secara nyata telah dilakukan penyelesaian sebanyak 160 kasus, hal ini merupakan suatu keberhasilan dalam penerapan dan peningkatan penghayatan dan pengamalan syariat Islam melalui pembinaan serta penyediaan sarana dan prasarana peribadatan kepada masyarakat.

Untuk indikator kinerja jumlah penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) mampu direalisasikan sebesar Rp.4,4 milyar dari jumlah target yang ditetapkan sebesar Rp.5 milyar dengan tingkat capaian sebesar 88,00%. Pencapaian tersebut menggambarkan tingkat kontribusi dari penerimaan Zakat terhadap realisasi Pendapatan Asli Aceh tahun 2011 baru mencapai 0,01%. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengamanatkan bahwa zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Aceh, maka untuk mengoptimalkan potensi ini, pemerintah Aceh telah membentuk lembaga Baitul Mal yang mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun zakat, infaq dan sadaqah dengan sasaran penggunaannya diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi ummat sesuai dengan hukum syariah. Sesuai dengan hasil yang diperoleh dari penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah serta pendistribusiannya dalam periode 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa sumber Zakat, Infaq dan Sadaqah dapat memberi kontribusi nyata yang cukup besar bagi penguatan dan peningkatan Pendapatan Asli Aceh.

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
11.	Meningkatnya kualitas dan pelayanan kesejahteraan sosial	Jumlah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2.145 Orang	2.145 Orang	100,00
		Jumlah pembangunan rumah untuk KAT dan korban konflik	3.092 unit	3.082 unit	99,68
		Jumlah anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial	8.324 orang	8.324 orang	100,00

Tingkat capaian indikator kinerja jumlah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pada tahun 2011 ditargetkan sebanyak 2.145 orang mampu direalisasikan sesuai dengan target atau 100%. Salah bentuk penanganan yang dilakukan melalui pemberian bantuan baik berupa modal usaha dan peralatan kerja maupun pelatihan keterampilan bagi PMKS. Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk tahun 2011 telah disalurkan bantuan kepada Keluarga miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Keluarga Rentan, Penyandang Cacat, Anak Cacat, Anak Jalanan, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Wanita Tuna Susila (WTS), Gelandangan dan Pengemis, Eks Warga Binaan Lembaga Per masyarakatan, dan Korban Bencana Alam. Pemberian bantuan ini diarahkan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah PMKS dan semakin meningkat taraf kesejahteraan sosial, keterampilan dan pengetahuan dalam bidang ekonomi, sosial dan kemasyarakatan.

Untuk memenuhi kebutuhan papan yang merupakan kebutuhan dasar bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan korban konflik, pemerintah Aceh pada tahun 2011 menargetkan pembangunan rumah layak huni sebanyak 3.092 unit. Namun dalam pelaksanaannya telah

direalisasikan sebanyak 3.082 unit atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,68%. Pembangunan rumah layak huni diperuntukkan kepada KAT sebanyak 29 unit yaitu di Kabupaten Gayo Lues berjumlah 9 (sembilan) unit dan 20 unit di Kabupaten Aceh Jaya.

Pembangunan rumah untuk korban konflik sebanyak 3.053 unit telah dilaksanakan pada beberapa kabupaten/kota terdiri dari : 205 unit di Kabupaten Aceh Besar, 276 unit di Kabupaten Pidie, 208 unit di Kabupaten Pidie Jaya, 35 unit di Kabupaten Aceh Tamiang, 163 unit di Kabupaten Aceh Jaya, 157 unit di Kabupaten Nagan Raya, 18 unit di Kabupaten Aceh Barat Daya, 202 unit di Kabupaten Aceh Barat, 176 unit di Kabupaten Bener Meriah, 10 unit di Kabupaten Gayo Lues, 434 unit di Kabupaten Aceh Selatan, 323 unit di Kabupaten Bireuen, 113 unit di Kota Subulussalam, 120 unit di Kabupaten Aceh Tengah, 215 unit di Kabupaten Aceh Timur, 259 unit di Kabupaten Aceh Utara, 58 unit di Kota Lhoksemawe, 10 unit di Kabupaten Aceh Singkil, 21 unit di Kabupaten Aceh Tenggara dan 50 unit di Kabupaten Simeulue.

Upaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi KAT dan korban bencana sosial akibat konflik terutama terhadap ketersediaan rumah yang layak huni setiap tahun tetap diprioritaskan mengingat masih banyak KAT dan korban konflik yang belum mendapat bantuan rumah dari pemerintah, sedangkan pembangunan rumah yang dilakukan oleh BRR tidak diperuntukkan bagi korban konflik hanya diutamakan kepada korban bencana alam gempa dan tsunami.

Terhadap indikator kinerja jumlah anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial dari target sebanyak 8.324 dapat direalisasikan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian dalam pemberian pelayanan perlindungan sosial yang diarahkan bagi anak yatim/piatu, anak korban konflik, anak korban tsunami dan anak terlantar dapat terlaksana dengan baik melalui pembinaan yang intensif pada panti asuhan yang tersebar pada 16 Kabupaten/Kota yaitu : Kota Banda

Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kota Lhoksemawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
12.	Meningkatnya pengembangan destinasi, apresiasi budaya dan adat istiadat	Jumlah kunjungan wisatawan manca Negara ke Aceh	28.000 orang	28.053 orang	100,19
		Jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Aceh	959.250 orang	959.146 orang	99,99
		Jumlah pengembangan objek pariwisata	19 Objek	17 Objek	89,47

Sektor pariwisata juga mengalami peningkatan cukup signifikan, yang tercermin dari jumlah wisatawan manca Negara yang berkunjung ke Aceh setiap tahun terus meningkat, pada tahun 2011 ditargetkan sebanyak 28.000 orang dengan realisasi sebanyak 28.053 atau tingkat capaian sebesar 100,19%. Keberhasilan pencapaian kinerja ini ditandai dengan jumlah wisatawan manca Negara yang berkunjung ke Aceh pada tahun 2011 meningkat sebesar 73,60% atau bertambah sebanyak 7.405 orang dibandingkan dengan tahun 2010 sebanyak 20.648 orang.

Demikian juga kunjungan wisatawan domestik ke Aceh pada tahun 2011 meningkat sebesar 33,20% atau sebanyak 959.146 orang, dengan jumlah penambahan sebanyak 239.067 orang dibandingkan dengan tahun 2010 yang berjumlah 720.079 orang. Keberhasilan dalam meningkatkan arus kunjungan wisatawan didukung dari upaya promosi melalui keikutsertaan pada pameran domestik dan manca Negara serta

faktor situasi dan kondisi keamanan daerah yang semakin kondusif sehingga telah mengubah tatanan kehidupan pengembangan bidang budaya dan pariwisata.

Untuk menarik minat wisatawan, pemerintah Aceh telah melakukan pengembangan beberapa objek wisata, pada tahun 2011 ditargetkan sebanyak 19 objek, dapat direalisasikan sebanyak 17 objek atau dengan tingkat capaian 89,47%. Pengembangan ini diarahkan pada program destinasi pariwisata melalui pemugaran dan pelestarian cagar budaya, pembangunan sarana/ prasarana wisata pada objek-objek yang membawa dampak positif bagi peningkatan perekonomian, terbukanya lapangan kerja, peningkatan pengetahuan terutama di bidang budaya dan bahasa masyarakat sekitar daerah wisata. Dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana objek wisata, pada tahun 2011 telah dibangun pada 17 objek wisata yaitu pengadaan meubiler pada objek wisata villa ketambe Kabupaten Aceh Tenggara, penataan dan pembangunan fasilitas arum jeram di kabupaten Aceh Tenggara, pembangunan dan penataan villa ketambe kabupaten Aceh Tenggara, pengadaan meubiler resort gapang di Sabang, lanjutan pembangunan objek wisata Cemara Indah Kabupaten Aceh Singkil, pembangunan grafity Gayo Highland Kabupaten Aceh Tengah, Revitalisasi Gedung Seni Budaya Kabupaten Simeulue, Pembangunan ODTW Ie Sejuk Panjupian Kabupaten Aceh Selatan, lanjutan pembangunan Gedung Seni Kabupaten Aceh Besar, Pembangunan Objek Wisata Weh Pesam Kabupaten Bener Meuriah, Penataan Interior Gapang Resort Sabang, Pengadaan Perahu Naga, Pembangunan Rest Area Kabupaten Aceh Jaya, Pembangunan lanjutan Gedung Pertemuan, Pembangunan sarana dan prasarana objek wisata Krueng Kaleung Kabupaten Aceh Jaya, Rehab Kantin Pantai Trienggadeng, dan Penataan Objek Wisata Trienggadeng. Berkaitan dengan pengembangan objek wisata sebagaimana dikemukakan, juga telah dilakukan pemugaran dan

pelestarian sebanyak 11 objek wisata cagar budaya terdiri dari Komplek Makam Poteumeureuhom Daya, Tugu Radio Rimba Raya, Mesium Kabupaten Aceh Jaya, Tugu/Benteng Kutarih, Kuburan Umum/Tsunami Weu Raya Lhoknga, Kuburan Umum/Tsunami Mon Ikeun Lhoknga, Tugu Syahid 44 Pandrah, Makam 44 Unit Jeunib, Benteng Jepang dan Kuruk-kuruk di Batee Geulungku, Mesium Islam Samudra Pase, dan Makam Tgk Mahyidin di Tangse.

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
13.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien	Jumlah produk hukum daerah yang diundangkan/ditetapkan	835 Dok	806 Dok	96,53
		Jumlah tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan	153 LHP	136 LHP	88,89
		Persentase kesesuaian perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	85 %	83 %	97,65
		Persentase aparatur yang mempunyai kompetensi	90 %	60 %	66,67
		Persentase tingkat Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap APBA	10 %	10,84 %	108,40
		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	85,71 %	85,71

Pada tahun 2011, Pemerintah Aceh telah menargetkan sebanyak 835 dokumen produk hukum daerah yang harus ditetapkan sebagai payung hukum atau legalitas dalam penyelenggara Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan social kemasyarakatan. Sampai dengan akhir tahun 2011 mampu direalisasikan sebanyak 806 dokumen produk hukum yang terdiri dari Qanun, Peraturan Gubernur

Aceh dan Keputusan Gubernur Aceh, atau dengan tingkat capaian sebesar 96,53%. Kekurangan realisasi ini disebabkan penyelesaian beberapa produk hukum antara lain Qanun yang telah ditetapkan menjadi program legislasi daerah tidak mendapat persetujuan bersama sehingga belum dapat diundangkan dalam tahun 2011. Demikian juga dengan beberapa kebijakan lainnya yang merupakan turunan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi masih dalam proses penyelesaian.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Aceh untuk menurunkan angka kebocoran dan kerugian Negara salah satunya dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Aceh dan Kabupaten/Kota. Dari jumlah tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dalam tahun 2011, mampu direalisasikan sebanyak 136 LHP atau 88,89% dari target yang ditetapkan sebanyak 153 LHP. Tingkat capaian indikator ini sudah menunjukkan upaya optimal pemerintah Aceh dalam menciptakan pemerintahan yang baik sesuai dengan misi aparatur pemerintah yang bersih, kompeten dan berwibawa, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Tingkat pencapaian indikator kinerja kesesuaian perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sebesar 97,65% dari target sebesar 85%, dalam pelaksanaannya mampu direalisasikan sebesar 83%. Angka capaian ini menunjukkan Pemerintah Aceh komit terhadap pelaksanaan PP Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, dengan menitikberatkan pada 3 (tiga) variabel yaitu luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah APBD, sehingga kelembagaan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan masih berdasarkan perumpunan, belum dapat

dilakukan secara nyata menurut kebutuhan, karakteristik dan kemampuan daerah yang tercermin dalam bidang teknis yang menjadi kewenangan daerah.

Namun demikian untuk mewujudkan besaran organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, secara bertahap akan dilakukan evaluasi organisasi perangkat daerah sebagai agenda utama (*quick wins*) yang menjadi sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh, dimulai dengan terbentuknya Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/88/2012 tanggal 6 Pebruari 2012 dan Pembentukan Sekretariat Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh dengan Keputusan Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh Nomor 065/110/2012 tanggal 17 Pebruari 2012.

Ketersediaan aparatur yang mempunyai kompetensi merupakan salah satu indikator untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien. Dalam tahun 2011, Pemerintahan Aceh telah menetapkan target indikator ini sebesar 90% dan hingga akhir tahun 2011 mampu direalisasikan sebesar 60% dengan tingkat capaian sebesar 66,67%. Tidak memenuhinya target capaian indikator ini disebabkan upaya pembinaan aparatur yang telah diprogramkan belum dapat berjalan secara optimal, terutama berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penjenjangan, fungsional dan teknis yang sesuai dengan bidang tugas, karena alokasi anggaran masih cukup terbatas dan proses akreditasi lembaga penyelenggara diklat masih dalam pertimbangan untuk legalisasi oleh Lembaga Administrasi Negara. Untuk mengatasi permasalahan ini Pemerintah Aceh akan berupaya mengadakan kerjasama yang lebih intensif dengan Lembaga Administrasi Negara dalam penyelenggaraan berbagai diklat teknis dan fungsional untuk memenuhi kompetensi

teknis. Khusus untuk diklat penjenjangan ke depan Pemerintah Aceh akan berupaya menyelenggarakan Diklat PIM II yang dapat menjangkau peserta dari wilayah se-Sumatera. Selain upaya tersebut secara bertahap dilakukan penataan kepegawaian berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Berkaitan dengan pencapaian indikator kinerja tingkat kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap APBA pada tahun 2011 dengan target sebesar 10,00% dapat direalisasikan sebesar 10,84% dengan tingkat capaian sebesar 108,40%. Tingkat capaian terhadap indikator kinerja utama ini relatif lebih baik dalam mendukung peningkatan kontribusi PAA terhadap APBA yaitu dengan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pencapaian Pendapatan Asli Aceh. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Pendapatan Asli Aceh sebesar Rp.799.451.065.471,20,- dari target yang ditetapkan pada tahun 2011 sebesar Rp.797.284.999.424,- atau mencapai 100,27%. Dibandingkan dengan besaran APBA tahun 2011 setelah perubahan yang ditetapkan sebesar Rp.7.979.778.571.000,- dengan realisasi sebesar Rp.7.374.632.649.255,- atau 92,42%, maka tingkat kontribusi realisasi PAA terhadap APBA tahun 2011 baru mencapai sebesar 10,84%.

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien juga tercermin dari indikator persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditargetkan sebesar 100%, dapat terealisasi sebesar 85,71% atau dengan tingkat capaian 85,71%. Tingkat capaian ini diperoleh berdasarkan jumlah pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan pada tahun 2011 dari sebanyak 21 pengaduan masyarakat, telah diselesaikan secara tuntas sebanyak 18 pengaduan masyarakat, sedangkan 3 (tiga) pengaduan masyarakat belum dapat ditangani dengan sempurna karena terdapat 1 (satu) kasus yang menjadi objek pengaduan masyarakat harus dilakukan

penyelesaiannya melalui pengadilan untuk mendapat ketetapan hukum tetap. Terhadap 2 (dua) kasus lainnya yang menjadi materi pengaduan masyarakat berkaitan dengan penerbitan izin hak guna usaha masih dalam negosiasi antara pemegang izin usaha dengan masyarakat sekitar, maka penyelesaian terhadap pengaduan tersebut tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Apabila dibandingkan dengan jumlah izin yang dikeluarkan pada tahun 2011 sebanyak 8.529 izin dan non izin, jumlah pengaduan masyarakat hanya sebanyak 21 pengaduan atau 0,25%. Hal ini membuktikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik terutama dalam pelayanan perizinan dan non perizinan sudah berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Berdasarkan hasil survey IKM pada tahun 2011, tingkat pelayanan perizinan dan non perizinan memperoleh skor sebesar 83,73% atau termasuk dalam kategori sangat baik.

Tabel 3.21
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
14.	Meningkatnya penanganan dan pengurangan resiko bencana	Persentase penanganan dan pengurangan risiko bencana	50 %	40 %	80,00
		Jumlah Kabupaten/Kota pilot project komunitas siaga bencana	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100,00

Dalam hal pencapaian indikator kinerja persentase penanganan dan pengurangan risiko bencana sampai dengan tahun 2011 mencapai sekitar 40% dari target yang ditetapkan sebesar 50% dengan tingkat capaian sebesar 80%. Untuk target indikator ini, sasaran yang diharapkan adalah dalam rangka mewujudkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana dan kemampuan pemerintah serta masyarakat dalam penanganan kebencanaan. Angka

realisasi tersebut, merupakan suatu gambaran bahwa pengkoordinasian penanggulangan bencana telah terlaksana dengan baik terutama antar instansi yang mempunyai kewenangan dan terkait secara langsung dalam penanganan dan penanggulangan bencana, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota maupun dengan lembaga-lembaga non pemerintah lainnya serta masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam penanggulangan kebencanaan.

Untuk mendorong pencapaian target indikator kinerja ini, telah dilakukan berbagai program dan kegiatan melalui pemetaan daerah rawan bencana, pelaksanaan sosialisasi mitigasi bencana, pelaksanaan simulasi early warning vulkanologi dan tsunami, serta pembentukan satgas kebencanaan terdiri dari unsur Perhubungan, Taruna Siaga Bencana (TAGANA), search and rescue (SAR), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Palang Merah Indonesia (PMI) dan stakeholder terkait lainnya yang dapat digerakkan secara cepat dan tepat apabila terjadi bencana. Kebijakan ini ditempuh dalam upaya peningkatan penanganan dan pengurangan risiko bencana.

Untuk indikator jumlah komunitas siaga bencana yang ditargetkan 10 (sepuluh) dapat direalisasikan 100%. Salah satu strategi dalam mewujudkan pencapaian sasaran meningkatkan penanganan dan pengurangan risiko bencana, telah diupayakan dengan mengoptimalkan peran komunitas siaga bencana sebagai garda terdepan yang memberi informasi dan mengarahkan warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengurangi risiko bencana dan penanganan kebencanaan baik pada masa pra bencana maupun masa tanggap darurat.

Berdasarkan tingkat kerawanan bencana hingga akhir tahun 2011 telah dibentuk komunitas siaga bencana pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen,

Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah. Pembentukan komunitas siaga bencana bertujuan untuk meminimalisir ketergantungan masyarakat kepada pemerintah dalam menghadapi bencana terutama pada masa tanggap darurat. Komunitas ini dibekali dengan pengetahuan mengenai kebencanaan dan pelatihan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan, kewaspadaan dan kedaruratan sehingga pada saat terjadinya bencana akan siap mengevakuasi masyarakat yang menjadi korban bencana.

D. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun anggaran 2011 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2011 sebesar **Rp.7.979.778.571.000,-**

Sesuai dengan komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2011, anggaran pendapatan berjumlah **Rp.7.979.778.571.000,-** terdiri dari Pendapatan Asli Aceh, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Lain-lain pendapatan Aceh yang sah sebesar **Rp.7.094.468.248.661,-** sedangkan pendapatan dari Penerimaan Pembiayaan Aceh sebesar **Rp.885.310.322.339,-**

Secara lebih terinci rencana dan realisasi anggaran pendapatan tahun 2011 dapat dilihat dalam tabel 3.22 berikut.

Tabel 3.22
Rencana dan Realisasi Anggaran Pendapatan Aceh
Tahun 2011

NO	URAIAN	RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Aceh	797,284,999,424.00	799,451,065,471.20	100.27
2.	Dana Perimbangan	1,746,648,181,737.00	2,262,767,792,213.00	129.55
3.	Dana Otonomi Khusus	4,510,656,496,500.00	4,510,656,496,500.00	100.00
4.	Lain-lain pendapatan Aceh yang sah	39,878,571,000.00	34,778,571,000.00	87.21
Jumlah		7,094,468,248,661.00	7,607,653,925,184.20	107.23
5.	Penerimaan Pembiayaan Aceh	885,310,322,339.00	1,306,726,214,378.04	147.60
Jumlah		885,310,322,339.00	1,306,726,214,378.04	147.60
Total		7,979,778,571,000.00	8,914,380,139,562.24	111.71

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi Anggaran pendapatan Aceh menunjukkan tingkat capaian yang optimal, karena secara keseluruhan realisasi anggaran pendapatan mencapai sebesar **Rp.8,914,380,139,562.24** atau meningkat sebesar **11,71%** dari target yang direncanakan sebesar **Rp.7.979.778.571.000,-**.

Sedangkan komposisi Anggaran belanja Aceh tahun 2011 yang direncanakan berjumlah **Rp.7.979.778.571.000,-** terdiri dari Belanja Tidak Langsung yaitu belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Belanja Tidak Terduga yang direncanakan sebesar **Rp.2.739.530.705.870,-**. Sedangkan untuk Belanja Langsung yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp.5.240.247.865.130,-**.

Secara lebih rinci rencana dan realisasi Belanja Aceh tahun 2011, dapat dilihat pada tabel 3.23 di bawah ini :

Tabel 3.23
Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja Aceh Tahun 2011

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	2,739,530,705,870.00	2,527,584,717,656.00	92.26
2.	Belanja Langsung	5,240,247,865,130.00	4,847,047,931,599.50	92.50
Jumlah		7,979,778,571,000.00	7,374,632,649,255.50	92.42

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa kemampuan daya serap anggaran Belanja Aceh tahun 2011 dapat mencapai rata-rata **92,42%**. Tingkat pencapaian realisasi anggaran yang relatif baik tersebut sebanding dengan hasil pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2011 yang memperoleh tingkat capaian rata-rata sebesar **92,18%**. Hal ini membuktikan bahwa tingkat akuntabilitas Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, telah dapat ditingkatkan sejalan dengan adanya perbaikan dalam sistim perencanaan, sistim penganggaran dan sistim pelaporan yang sinergi sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yang berbasis kinerja.



BAB IV PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Aceh tahun 2011 memberikan gambaran tentang capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun 2007-2012.

Untuk melihat tingkat capaian kinerja dilakukan dengan pengukuran terhadap 26 Indikator Kinerja Utama, 14 sasaran strategis dan 58 indikator kinerja melalui analisis dengan membandingkan antara realisasi dan target kinerja yang ditetapkan, sehingga akan diperoleh tingkat pencapaian yang objektif baik keberhasilan atau kegagalan.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 26 indikator kinerja utama diperoleh tingkat capaian rata-rata **85,96%**, sedangkan tingkat pencapaian terhadap 14 sasaran strategis yang diukur melalui 58 indikator kinerja, secara akumulatif tingkat pencapaian rata-rata dapat diperoleh sebesar **92,18%**.

Tingkat pencapaian yang relatif baik merupakan keberhasilan dalam pencapaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2011.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja secara akumulatif, diakui belum diikuti dengan tingkat pencapaian yang optimal pada setiap indikator kinerja utama dan sasaran strategis. Hal ini disebabkan karena masih adanya hambatan yang merupakan suatu kegagalan dalam pencapaian beberapa indikator kinerja utama dan sasaran strategis, antara lain belum berjalannya pengawasan yang optimal dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, perencanaan yang kurang berbasis kinerja, kompetensi SDM yang masih lemah, perubahan iklim serta lokasi kegiatan yang sulit terjangkau.



BAB IV PENUTUP

Untuk mengatasi mengatasi hal dimaksud telah dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran serta mensinkronisasikan antara rencana program dan kegiatan dengan rencana anggaran sesuai menurut ruang lingkup tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Aceh.

PENGUKURAN KINERJA

PROVINSI : ACEH

TAHUN : 2011

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan menurunnya angka kemiskinan	Persentase Pertumbuhan ekonomi dengan migas	3 %	1,31 %	43,67
		Persentase Pertumbuhan ekonomi tanpa migas	6 %	1,55 %	25,83
		Tingkat pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan dengan migas	34,1 Triliun	8,52 Triliun	24,99
		Tingkat pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan non migas	30,8 Triliun	7,52 Triliun	24,42
		Persentase penurunan angka pengangguran	1 %	0,19 %	19,00
		Persentase penurunan angka penduduk miskin	1,98 %	1,41 %	71,21
		Persentase peningkatan produksi sektor pertanian dan perikanan	1,08 %	1,46 %	135,19
	Jumlah investor dalam dan luar negeri	76 Prshn	75 Prshn	98,68	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan sarana/ prasarana permukiman	Panjang jalan provinsi dalam kondisi baik	161,14 Km	159,80 Km	99,17
		Panjang jembatan dalam kondisi baik	2.072,07 Meter	2.061,50 Meter	99,49
		Panjang jaringan air bersih	88.935 Meter	84.524 Meter	95,04
		Panjang saluran drainase dan gorong-gorong yang dibangun	81.035 Km	81.035 Km	100,00
		Panjang jalan pedesaan yang dibangun	70 Km	69,75 Km	99,64
		Jumlah rumah sehat sederhana siap huni bagi masyarakat korban bencana dan dhuafa	811 Unit	806 Unit	99,38
3	Meningkatnya ketepatan bangunan irigasi, pengaman pantai dan normalisasi sungai	Luas cakupan irigasi dalam kondisi baik	41,887 Ha	41,887 Ha	100,00
		Panjang pembangunan pengaman pantai	5.598,65 Ha	5.598,65 Ha	100,00
		Panjang pengaman tebing sungai	35.524,80 Ha	35.524,80 Ha	100,00
4	Meningkatnya pelayanan jaringan transportasi, komunikasi, informasi dan telematika	Persentase ketersediaan fasilitas perhubungan komunikasi dan informatika yang memenuhi SPM	100 %	87 %	87,00
		Jumlah prasarana perhubungan darat	24 Unit	24 Unit	100,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Meningkatnya pengembangan pertambangan dan energi yang berkelanjutan	Jumlah prasarana perhubungan laut	7 Unit	7 Unit	100,00
		Jumlah prasarana perhubungan udara	8 Unit	8 Unit	100,00
		Jumlah aplikasi e-gov pemda	7 Aplikasi	7 Aplikasi	100,00
		Jumlah pengembangan energi alternatif/ terbarukan	4 Lokasi	3 Lokasi	75,00
		Jumlah pembangkit listrik bagi masyarakat desa yang tidak terjangkau PLN	8 Unit	8 Unit	100,00
6	Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah pengeboran air tanah pada daerah krisis air bersih	22 Lokasi	22 Lokasi	100,00
		Luas areal yang terlindungi	214 Ha	62 Ha	28,97
		Persentase kendaraan bermotor yang lulus uji emisi	100 %	70,26 %	70,26
		Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah mempunyai Ruang Terbuka Hijau	16 Kab/Kota	3 Kab/Kota	18,75
		Persentase penurunan pencemaran kadar BOD air sungai	15 %	10 %	66,67
		Jumlah perusahaan yang sudah mengelola B3	14 Prsh	16 Prsh	114,29

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan	Persentase peningkatan APK PAUD 4-6 Tahun	35 %	36,72 %	104,91
		Persentase peningkatan APM SD/MI/ SDLB	96,50 %	98,52 %	102,09
		Persentase peningkatan APK SMP/ MTs/ SMPLB	98,50 %	100,89 %	102,43
		Persentase peningkatan APK SMA/ MA/ SMALB/SMK	92 %	81,57 %	88,66
8	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan	Rata-rata nilai UN SMP/MTs	7,36 Nilai	7,65 Nilai	103,94
		Rata-rata nilai UN SMA/MA	7,40 Nilai	7,46 Nilai	100,81
		Jumlah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tingkat SMP, SMA, dan SMK	22 Sekolah	28 Sekolah	127,27
		Persentase SMK berbasis keunggulan lokal	24 %	22 %	91,67
9	Meningkatnya mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Tingkat pelayanan kesehatan	85 %	85 %	100,00
		Rasio Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	24 per 1000 LH	16,3 per 1000 LH	132,08
		Rasio Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	118 per 100.000 LH	119 per 100.000 LH	99,15
		Angka Usia harapan hidup	72 Tahun	71 Tahun	98,61

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan syariat Islam	Penanganan pelanggaran syariat islam	150 Kasus	160 Kasus	106,67
		Jumlah penerimaan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS)	5.000.000.000 Rupiah	4.400.000.000 Rupiah	88,00
11	Meningkatnya kualitas dan pelayanan kesejahteraan sosial	Jumlah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2.145 Orang	2.145 Orang	100,00
		Jumlah pembangunan rumah untuk KAT dan korban konflik	3.092 Unit	3.082 Unit	99,68
		Jumlah anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial	8.324 Orang	8.324 Orang	100,00
12	Meningkatnya pengembangan destinasi, apresiasi budaya dan adat istiadat	Jumlah kunjungan wisatawan manca Negara ke Aceh	28.000 Orang	28.053 Orang	100,19
		Jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Aceh	959.250 Orang	959.146 Orang	99,99
		Jumlah pengembangan objek pariwisata	19 Objek	17 Objek	89,47
13	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien	Jumlah produk hukum daerah yang diundangkan/ ditetapkan	835 Dokumen	806 Dokumen	96,53
		Jumlah tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan	153 LHP	136 LHP	88,89

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Meningkatnya penanganan dan pengurangan resiko bencana	Persentase kesesuaian perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	85 %	83 %	97,65
		Persentase aparatur yang mempunyai kompetensi	90 %	60 %	66,67
		Persentase tingkat Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap APBA	10 %	10,84 %	108,40
		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100 %	85,71 %	85,71
		Persentase penanganan dan pengurangan risiko bencana	50 %	40 %	80,00
		Jumlah Kabupaten/Kota pilot project komunitas siaga bencana	10 Kab/kota	10 Kab/kota	100,00

Jumlah Anggaran Tahun 2011

Rp. 4.969.411.045.782,-

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2011

Rp. 4.594.122.760.432,-

PENETAPAN KINERJA

PROVINSI : ACEH

TAHUN : 2011

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan menurunnya angka kemiskinan.	Persentase Pertumbuhan ekonomi dengan migas	3 %
		Persentase Pertumbuhan ekonomi tanpa migas	6 %
		Tingkat pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan dengan migas	34,1 Triliun
		Tingkat pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan non migas	30,8 Triliun
		Persentase penurunan angka pengangguran	1 %
		Persentase penurunan angka penduduk miskin	1,98 %
		Persentase peningkatan produksi sektor pertanian dan perikanan	1,08 %

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan sarana/ prasarana permukiman	Jumlah investor dalam dan luar negeri	76 Perusahaan
		Panjang jalan provinsi dalam kondisi baik	161,14 Km
		Panjang jembatan dalam kondisi baik	2.072,07 Meter
		Panjang jaringan air bersih	88.935 Meter
		Panjang saluran drainase dan gorong-gorong yang dibangun	81.035 Km
		Panjang jalan pedesaan yang dibangun	70 Km
		Jumlah rumah sehat sederhana siap huni bagi masyarakat korban bencana dan dhuafa	811 Unit
3	Meningkatnya ketepatan bangunan irigasi, pengaman pantai dan normalisasi sungai	Luas cakupan irigasi dalam kondisi baik	41,887 Ha
		Panjang pembangunan pengaman pantai	5.598,65 Ha
		Panjang pengaman tebing sungai	35.524,80 Ha

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Meningkatnya pelayanan jaringan transportasi, komunikasi, informasi dan telematika	Persentase ketersediaan fasilitas perhubungan komunikasi dan informatika yang memenuhi SPM	100 %
		Jumlah prasarana perhubungan darat	24 Unit
		Jumlah prasarana perhubungan laut	7 Unit
		Jumlah prasarana perhubungan udara	8 Unit
		Jumlah aplikasi e-gov pemda	7 Aplikasi
5	Meningkatnya pengembangan pertambangan dan energi yang berkelanjutan	Jumlah pengembangan energi alternatif/ terbarukan	4 Lokasi
		Jumlah pembangkit listrik bagi masyarakat desa yang tidak terjangkau PLN	8 Unit
		Jumlah pengeboran air tanah pada daerah krisis air bersih	22 Lokasi
6	Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Luas areal yang terlindungi	214 Ha
		Persentase kendaraan bermotor yang lulus uji emisi	100 %

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan	Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah mempunyai Ruang Terbuka Hijau	16 Kab/Kota
		Persentase penurunan pencemaran kadar BOD air sungai	15 %
		Jumlah perusahaan yang sudah mengelola B3	14 Prsh
		Persentase peningkatan APK PAUD 4-6 Tahun	35 %
		Persentase peningkatan APM SD/ MI/ SDLB	96,50 %
		Persentase peningkatan APK SMP/ MTs/ SMPLB	98,50 %
8	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan	Persentase peningkatan APK SMA/ MA/ SMALB/SMK	92 %
		Rata-rata nilai UN SMP/MTs	7,36 Nilai
		Rata-rata nilai UN SMA/MA	7,40 Nilai

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Meningkatnya mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Jumlah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tingkat SMP, SMA, dan SMK	22 Sekolah
		Persentase SMK berbasis keunggulan lokal	24 %
		Tingkat pelayanan kesehatan	85 %
		Rasio Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	24 per 1000 LH
		Rasio Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	118 per 100.000 LH
		Angka Usia harapan hidup	72 Tahun
10	Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan syariat Islam	Penanganan pelanggaran syariat islam	150 Kasus
		Jumlah penerimaan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS)	5.000.000.000 Rupiah

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Meningkatnya kualitas dan pelayanan kesejahteraan sosial	Jumlah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2.145 Orang
		Jumlah pembangunan rumah untuk KAT dan korban konflik	3.092 Unit
		Jumlah anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial	8.324 Orang
12	Meningkatnya pengembangan destinasi, apresiasi budaya dan adat istiadat	Jumlah kunjungan wisatawan manca Negara ke Aceh	28.000 Orang
		Jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Aceh	959.250 Orang
		Jumlah pengembangan objek pariwisata	19 Objek
13	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien	Jumlah produk hukum daerah yang diundangkan/ ditetapkan	835 Dokumen
		Jumlah tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan	153 LHP
		Persentase kesesuaian perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	85 %

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Meningkatnya penanganan dan pengurangan resiko bencana	Persentase aparatur yang mempunyai kompetensi	90 %
		Persentase tingkat Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap APBA	10 %
		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100 %
		Persentase penanganan dan pengurangan resiko bencana	50 %
		Jumlah Kabupaten/Kota pilot project komunitas siaga bencana	10 Kab/kota

Jumlah Anggaran Tahun 2011 Rp. 4.969.411.045.782,-

GUBERNUR ACEH

d.t.o

IRWANDI YUSUF